



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

- Laporan Profil Risiko
- Self Assessment 12 Faktor Tata Kelola
- Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi
YMF Kepatuhan
- Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit
- Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan

SEMESTER I TAHUN 2025

LAPORAN PROFIL RISIKO

A. PROFIL RISIKO

Periode	:	Semester I Tahun 2025
Nama BPR	:	PT. BPR BERKAH (Perseroda)
Alamat	:	JL. MAYOR WIDAGDO KABAYAN PANDEGLANG
Nomor Telepon	:	(0253)5550095
Modal Inti	:	Rp. 17.906.109.053
Total Aset	:	Rp. 256.269.048.092
Jumlah Kantor Cabang	:	Tidak memiliki cabang
Kegiatan sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit	:	Ya

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya (Semester II Tahun 2024)		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	2	2	2	2	2
Risiko Operasional	2	2	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	2	2
Risiko Likuiditas	3	1	2	3	1	2
Peringkat Risiko			2			2

Keterangan Peringkat: 1 (Sangat Rendah), 2 (Rendah), 3 (Sedang), 4 (Tinggi), 5 (Sangat Tinggi)

Analisis
<p>Profil Risiko BPR termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Rata-rata tingkat KPMR sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.

B. ANALISIS PER JENIS RISIKO

ANALISIS RISIKO KREDIT

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Periode : Semester I Tahun 2025

Analisis
<p>1. Tingkat Risiko: Peringkat 2, Rendah</p> <p>2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah;eksposur pemberian kredit terdiversifikasi baik;pemberian kredit memiliki kualitas yang baik;strategi pemberian kredit tergolong relatif stabil; danportofolio pemberian kredit kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal. <p>3. KPMR: KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.Proses penyediaan dana secara umum memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses kredit berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu

- proses secara keseluruhan.
10. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.
 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Periode : Semester I Tahun 2025

Analisis
<p>1. Tingkat Risiko: Peringkat 2, Rendah</p> <p>2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakter antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. bisnis BPR memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan;b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI;d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dane. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah. <p>3. KPMR: KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakter antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.

9. Manajemen keberlangsungan usaha (business continuity management/BCM) andal dan teruji.
10. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.
11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Periode : Semester I Tahun 2025

Analisis
<p>1. Tingkat Risiko: Peringkat 2, Rendah</p> <p>2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPR;b. rekam jejak kepatuhan BPR baik;c. BPR telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku;d. terdapat proses litigasi pada BPR tetapi frekuensi dan/ atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR;e. perjanjian yang dibuat oleh BPR memadai;f. terdapat produk dan aktivitas BPR yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan. <p>3. KPMR: KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik.7. Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam

- mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.
9. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.
 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Periode : Semester I Tahun 2025

Analisis
<p>1. Tingkat Risiko: Peringkat 2, Rendah</p>
<p>2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko sedang, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil cukup signifikan;cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan cukup baik; danakses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi yang cukup baik, serta standby loan dan dukungan likuiditas dari grup BPR cukup memadai.
<p>3. KPMR: KPMR untuk Risiko likuiditas sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. BPR termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi.Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai.Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik.Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik.Strategi Risiko likuiditas sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan

Dewan Komisaris.

10. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.
11. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

PANDEGLANG, 18 Juli 2024
PT. BPR BERKAH (Perseroda)

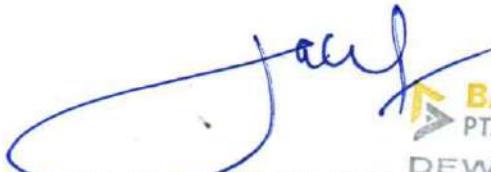


KIKI DIKDUL HUDA, S.E
DIREKTUR KEPATUHAN

BANK BPR BERKAH
PT. BPR BERKAH (Perseroda)

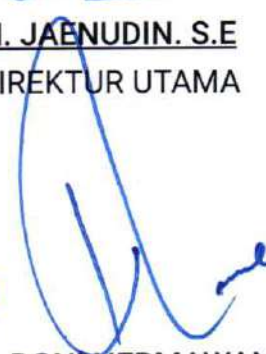


H. JAENUDIN. S.E
DIREKTUR UTAMA



HJ. NURIAH, SKM, M.SI.
ANGGOTA KOMISARIS

BANK BPR BERKAH
PT. BPR BERKAH (Perseroda)



Drs. DONI HERMAWAN
KOMISARIS UTAMA

1. RISIKO KREDIT

INHEREN						
No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit	Rasio aset produktif terhadap total aset	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit rendah	2 (Rasio 90.8%)	1.75	untuk parameter rasio aset produktif terhadap total aset memiliki resiko yang sedang
		Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	>75%, skema kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis kredit tidak beragam	2 (Rasio 99.8%)		Berikut adalah penjelasan parameter risiko yang dinilai BPR dalam beberapa kalimat: Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif BPR mencapai 90,9%, yang merupakan tingkat risiko rendah (peringkat 2). Dengan rasio di atas 75%, sebagian besar atau seluruh skema kredit yang ditawarkan sederhana, dan jenis kredit yang ditawarkan tidak beragam.
		Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	<= 20%	1 (Rasio 6.4%)		BPR menilai parameter risiko dengan mempertimbangkan rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan, yang mencapai 6,3%. Peringkat risiko ini adalah 1 (Sangat Rendah), yang berarti konsentrasi kredit pada 25 debitur terbesar masih

					<p>sangat rendah dan berada di bawah ambang batas 20%.</p> <p>BPR memiliki rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan sebesar 97,7%, yang termasuk dalam kategori risiko rendah (peringkat 2). Ini berarti lebih dari 85% kredit berasal dari tiga sektor ekonomi terbesar, dan komposisi ini relatif tidak berubah dalam jangka waktu yang lama.</p>
		Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	>85% kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama	2 (Rasio 97.6%)	
2	Kualitas aset	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	<p>"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan tidak signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain" 	2 (Rasio 7.48%)	<p>2.00</p> <p>Berikut adalah rangkuman informasinya dalam 2-3 kalimat:</p> <p>BPR memiliki rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif sebesar 8.5%, yang dinilai dengan peringkat 2 (Rendah). Kondisi ini menunjukkan kualitas kredit yang baik, ditandai dengan jumlah kredit restrukturisasi, penurunan kualitas kredit, dan kredit menunggak yang tidak signifikan. Selain itu, sektor ekonomi berisiko tinggi tidak memberikan dampak signifikan, dan mayoritas aset bermasalah adalah penempatan pada bank lain.</p>

	Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan (NPL net)	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan tidak signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain"	2 (Rasio 5.17%)	Rasio Kredit Bermasalah Bersih (NPL net) BPR sebesar 9,38% dengan peringkat 2 (Rendah) menunjukkan kualitas kredit yang baik. Hal ini tercermin dari jumlah kredit restrukturisasi yang tidak signifikan, penurunan kualitas kredit dari kategori Lancar ke Tidak Lancar yang tidak berarti, serta exposure yang kecil ke sektor berisiko tinggi dan kredit macet yang berasal dari penempatan pada bank lain.
	Rasio kredit kualitas rendah (KKR) terhadap total kredit yang diberikan	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non	2 (Rasio 9.27%)	BPR memiliki rasio kredit kualitas rendah (KKR) sebesar 91,8% terhadap total kredit yang diberikan, dengan peringkat risiko Rendah (peringkat 2). Meskipun rasionya tinggi, kondisi kredit BPR tetap baik karena kredit restrukturisasi, penurunan kualitas kredit, sektor berisiko tinggi, dan kredit menunggak tidak signifikan. Aset

			Performing Loan tidak signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain"			produktif bermasalah sebagian besar ditempatkan pada bank lain, menunjukkan pengelolaan risiko yang baik.
3	Strategi penyediaan dana	Strategi penyediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri, dan • Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai. 	2	2.00	Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri dan seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang di kuasai.
4	Faktor eksternal	Faktor eksternal	Terdapat perubahan faktor eksternal, yang berdampak pada kinerja bisnis debitur sehingga menyebabkan terjadi tunggakan pinjaman tetapi tidak menurunkan kualitas kredit debitur menjadi NPL.	3	3.00	Terdapat perubahan faktor eksternal, namun ada sebagian terdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.
Total Risiko				18	8.75	
Nilai Rata-rata				2.19		
Nilai Self Assessment				2		

KPMR

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu- waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko kredit. 	1	1.50	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Risiko kredit.
		Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan 	2		Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi

pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	2
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit;	1

Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan	
Memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.	

rangka mitigasi Risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	- Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan.	
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik - unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.	1
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan	2

Memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.
Terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten

			- tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.			
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit.	2	2.00	Telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit.
		Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan	2		Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten.

<p>Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara berkala?</p>	<p>pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. 	
<p>Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan 	2

<p>Menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru dan terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan aktivitas baru dengan ketentuan.</p>

		ketentuan?	- terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.			
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur; - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan cukup konsisten.	2	2.00	Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur.
		Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup	2		Telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit.

		keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<p>lengkap, akurat, kini, dan utuh;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester. 			
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	<ul style="list-style-type: none"> - SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. 	2	2.00	Audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR.
		Apakah sistem pengendalian intern	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan	2		Terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing

	terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan tidak berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.		jenjang perorganisasian BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.
	Total KPMR		23	
	Nilai Rata-rata		1.77	
	Nilai Self Assessment		2	

2. RISIKO OPERASIONAL

INHEREN						
No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Kompleksitas bisnis dan kelembagaan dan	Skala usaha dan struktur organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Skala usaha BPR tergolong kecil atau menengah; dan • Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan. 	3	1.75	Skala usaha BPR tergolong kecil atau menengah dan Struktur organisasi BPR terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPR.
		Jaringan kantor dan rentang kendali	Jaringan kantor & Rentang kendali dan lokasi kantor cabang: BPR tidak memiliki jaringan kantor cabang dan/ atau kantor kas.	1		Memiliki kantor kas dan rentang kendali kecil serta lokasi kantor kas dapat di akses dengan mudah.
		Keberagaman produk dan/atau jasa	BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama	1		BPR memiliki produk/ jasa yang termasuk kegiatan usaha utama.
		Tindakan korporasi	<ul style="list-style-type: none"> - BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan; - Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPR; dan/atau - BPR dalam proses pengembangan produk dan/ atau aktivitas baru (yang hanya memerlukan pelaporan ke OJK). 	2		BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan serta BPR tidak dalam proses pemindahan kantor pusat BPR.

2	Sumber daya manusia (SDM)	Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	Kuantitas dan kualitas SDM BPR cukup memadai.	3	2.50	Kuantitas dan kualitas SDM BPR memadai.
		Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi human error pada BPR; namun • tidak berdampak finansial bagi BPR. 	2		Terjadi human error pada BPR, namun tidak berdampak finansial bagi BPR.
3	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	<ul style="list-style-type: none"> • TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan • BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI. 	2	2.00	TI BPR sesuai dengan ketentuan dan BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.
4	Penyimpangan (fraud)	Penyimpangan (fraud)	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR dengan frekuensi tinggi; dan - mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPR membukukan laba negatif dan tidak menyebabkan rasio permodalan menurun 	3	3.00	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR.
5	Faktor eksternal	Faktor eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kejadian eksternal; namun • tidak berdampak finansial bagi BPR 	2	2.00	Terdapat faktor eksternal namun tidak berdampak finansial bagi BPR.
Total Risiko				19	11.25	
Nilai Rata-rata				2.25		
Nilai Self Assessment				2		

KPMR

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. 	2	2.00	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional serta Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional.
		Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan 	2		Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi serta evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi.

lanjut hasil evaluasi dimaksud?	yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.	2
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - tidak seluruh jenjang	2

Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Oprasional serta menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko oprasional yang telah ditetapkan.
Direksi mengomunikasi kan kebijakan Risiko oprasional dan seluruh jenjang oragnisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko oprasional yang diterapkan.

Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi Manajemen Risiko operasional?	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; - unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional. 	2
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko operasional?	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara 	2

Unit kerja yang menangani fungsi oprasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
Terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten.

			konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.			
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional	2	2.00	Terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan.
		Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh	- memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan	2		memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit

<p>Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala?</p>	<p>pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. 		<p>untuk keperluan pengendalian intern; melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan ketentuan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang 	<p align="center">2</p>	<p>Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kepatuhan dan menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.</p>

			tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.			
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; <input checked="" type="checkbox"/> penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan cukup konsisten.	2	2.00	Telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi penerapan manajemen risiko operasional dilakukan dengan memadai dan penerapan manajemen risiko operasional tidak dilakukan cukup konsisten.
		Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional;	2		Telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko operasional data pada sistem informasi manajemen risiko cukup

mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> - data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester. 	
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi; - telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 	2
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi Risiko terkait kejadian eksternal?	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan 	2

lengkap, akurat, kini dan utuh sistem informasi manajemen risiko mendukung direksi dalam pengambilan keputusan dan sistem informasi manajemen risiko cukup mendukung SKMR dalam pembuatan laporan kepada direksi setiap semester.
Telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh direksi, telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan dan telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan
Telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan

			<p>bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan - telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 			ketentuan
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	<ul style="list-style-type: none"> - SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbang kan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan 	2	2.00	SKAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko oprasional ,memberikan rekomendasi ,dan melaporkan hasil audit intern kepada direktur utama, Audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko oprasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi.

		dampak yang signifikan.		
	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	<ul style="list-style-type: none"> - seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan tidak berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional. 	2	Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko oprasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko oprasional dan tidak berdampak signifikan ,terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki ekspour risiko oprasional SKMR dan SKAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki ekspour risiko oprasional
	Total KPMR		30	

Nilai Rata-rata	2.00		
Nilai Self Assessment	2		

3. RISIKO KEPATUHAN

INHEREN						
No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenis sanksi ringan; dan Frekuensi pelanggaran rendah. 	2	2.00	Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dan dalam proses penyesuaian.
		Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang tinggi dibandingkan periode sebelumnya.	2		Tidak terdapat pelanggaran berulang
2	Faktor kelemahan aspek hukum	Kelemahan dalam perikatan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian dan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya klausula 	2	1.67	Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak terdapat kelemahan dalam perjanjian kredit

			dalam perjanjian namun tidak berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan kerugian yang material.			
		Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPR.	2		Tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian
		Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian.	1		Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian
	Total Risiko			9	3.67	
	Nilai Rata-rata			1.83		
	Nilai Self Assessment			2		

KPMR

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;	2	2.00	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dan telah melakukan evaluasi terhadap

	<p>kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu- waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. 	2		<p>kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.</p>
	<p>Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan. 	2		<p>Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi dan evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester.</p>
	<p>Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; 	2		<p>Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan ,menjalankan</p>

kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	- menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	2
Apakah BPR telah memiliki kecukupan	- memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang	2

kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan. Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris dan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko kepatuhan.
Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, Direksi mengkomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dan seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan.
memiliki SKMR yang merangkap fungsi kepatuhan dan telah melaksanakan

organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan?	menangani fungsi kepatuhan; - satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan - memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan	
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	2
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung	- Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan;	2

tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan.
terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, Direksi

		terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	- Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan - memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR namun tidak berjalan optimal.			memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR dan memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR.
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	2	2.00	telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dan terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan dan terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.
		Apakah BPR memiliki prosedur	1) - memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan	2		memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi

<p>Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala?</p>	<p>penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. 	
<p>Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; 	<p>2</p>

<p>paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten dan melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan dan menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal</p>

		<p>aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan. 			<p>terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.</p>
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	<p>Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten. 	2	2.00	<p>telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidak patuhan BPR, serta proses litigasi serta penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai dan cukup konsisten.</p>
		<p>Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; - data pada sistem informasi 	2		<p>telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem</p>

		dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan - sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.			informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbang kan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak	2	2.00	SKAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama, audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.

			seungguhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.		
	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	2		Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan dan SKMR dan SKAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.

Total KPMR	28		
Nilai Rata-rata	2.00		
Nilai Self Assessment	2		

4. RISIKO LIKUIDITAS

INHEREN						
No	Pilar	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban	Rasio aset likuid terhadap total aset	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	2 (Rasio 6.1%)	2.60	masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo
		Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	2 (Rasio 17.9%)		komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo
		Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	LDR lebih tinggi dari 90% namun kredit berkualitas tidak baik kurang signifikan	3 (Rasio 275.22%)		BPR mencatat LDR sebesar 275,21% dengan peringkat risiko 3 (Sedang). LDR tinggi ini menandakan risiko yang lebih besar karena kredit yang diberikan melebihi dana pihak ketiga. Meskipun demikian, kualitas kredit tidak menunjukkan penurunan yang

					signifikan, sehingga risiko masih dalam kategori moderat.	
		Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	Komposisi 25 deposan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan seluruhnya merupakan nasabah lama	2 (Rasio 31.93%)	BPR menilai risiko berdasarkan rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga sebesar 31,93%, yang diklasifikasikan dalam peringkat 2 (Rendah). Peringkat ini menunjukkan bahwa lebih dari 25% dana berasal dari 25 nasabah terbesar, dan seluruhnya merupakan nasabah lama, yang menandakan konsentrasi dana yang relatif tinggi dari sumber yang sama.	
		Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10%, dan signifikan sehingga hampir mendominasi pendanaan BPR	4 (Rasio 71.81%)	Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan BPR adalah sebesar 67,58%, yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (peringkat 4). Ini berarti pendanaan non inti BPR sangat signifikan, bahkan mendominasi total pendanaan, karena melebihi ambang batas 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPR memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber pendanaan non inti.	
2	Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan	Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • BPR cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis (100%); dan/atau • Arus kas BPR yang berasal dari aset dan kewajiban dapat 	3	3.00	<p>Berikut adalah ringkasan informasi parameter risiko BPR dalam 2-3 kalimat:</p> <p>BPR dinilai memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan</p>

	kebutuhan pendanaan, misalnya dengan melihat kewajaran suku bunga sumber dana yang diperoleh.	saling tutup dengan cukup baik (100%), terutama pada jangka pendek.			pendanaannya, baik dalam situasi normal maupun krisis. Dengan peringkat 3 (Sedang), BPR mampu memenuhi semua kewajiban dan kebutuhan arus kasnya (100%), serta arus kas dari aset dan kewajiban yang saling menutup dengan baik, terutama dalam jangka pendek (100%).
	Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.	Akses BPR pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi BPR cukup baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik cukup memadai, dan terdapat komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/ perusahaan induk/ intra grup BPR yang cukup memadai.	3		BPR memiliki komitmen pendanaan yang cukup memadai, dengan peringkat 3 (Sedang). Hal ini ditunjukkan dengan reputasi BPR yang baik, akses pinjaman bank yang memadai, dan adanya komitmen atau dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali, perusahaan induk, atau intra grup yang memadai.
	Total Risiko		19	5.60	
	Nilai Rata-rata		2.80		
	Nilai Self Assessment		3		

KPMR

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Indikator	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan	Apakah Dewan	- Dewan Komisaris telah	1	1.17	Dewan Komisaris telah memberikan

	<p>Direksi dan Komisaris</p>	<p>Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?</p>	<p>memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko likuiditas 		<p>persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dan telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala.</p>
		<p>Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha 	<p align="center">2</p>	<p>Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi dan evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.</p>

dimaksud?	BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan	
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan - kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko likuiditas.	1
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi mengomunikasi kan	1

Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris dan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko likuiditas.	
Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas	

		<p>likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?</p>	<p>kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan</p>			
		<p>Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas?</p>	<p>- memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas; - unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas</p>	1		<p>memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas dan unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.</p>
		<p>Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko likuiditas?</p>	<p>- terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</p>	1		<p>terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</p>
2	Kecukupan	<p>Apakah BPR telah</p>	<p>- telah memiliki kebijakan</p>	2	1.33	<p>BPR telah memiliki kebijakan</p>

	<p>Kebijakan, Prosedur, dan Limit</p>	<p>memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan Risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?</p>	<p>Manajemen Risiko likuiditas; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.</p>			<p>Manajemen Risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan Risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis</p>
	<p>Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan</p>	<p>1) - memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga</p>	<p>1</p>			<p>memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern melaksanakan</p>

		<p>prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?</p>	<p>memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern;</p> <ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 		<p>prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten dan melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p>Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan. 	<p>1</p>	<p>terdapat kesesuaian antara kebijakan prosedur produk dan aktivitas baru dengan ketentuan</p>

3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	<ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan cukup konsisten 	2	2.00	telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas
	Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan 	2	BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala		

			- sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.			
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	2	2.00	SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan
		Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya	2		seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko,

		<p>memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan tidak berdampak signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas. 		<p>prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan tidak berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas dan SKMR dan SKAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.</p>
	Total KPMR		19	
	Nilai Rata-rata		1.46	
	Nilai Self Assessment		1	

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
SEMESTER I TAHUN 2025

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)
Alamat : JL. MAYOR WIDAGDO KABAYAN PANDEGLANG
Nomor Telepon : (0253)5550095
Posisi Laporan : Semester I Tahun 2025
Modal Inti : Rp17.906.109.053
Total Aset : Rp256.269.048.092

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 3 (Cukup Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
<ol style="list-style-type: none">1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur, Aspek Pemegang Saham BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.2. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.3. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.4. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.5. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.6. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.8. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.9. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.10. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.11. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola
<ol style="list-style-type: none">1. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian memadai.2. Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi memadai.3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris BPR tergolong memadai.4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan BPR tergolong memadai.5. Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai memadai.6. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern di BPR menunjukkan kondisi memadai.7. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern berjalan dengan sangat memadai.8. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian memadai.9. Proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini dinilai memadai.10. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan

<p>Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan memadai.</p> <p>11. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR adalah memadai.</p>
<p>C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian memadai. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai memadai. 3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai. 4. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan memadai. 5. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai memadai. 6. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah memadai. 7. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai memadai. 8. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dinilai memadai. 9. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan penilaian memadai.
<p>Faktor Negatif</p>
<p>A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur</p> <p>Struktur dan Infrastruktur dalam upaya pengembangannya, bpr memili struktur dan infrstruktur pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi dengan pencapaian belum terpenuhi secara keseluruhan. Struktur dan Infrastruktur tata kelola pada aspek benturan kepentingan secara umum telah memadai. Struktur dan Infrastruktur pada aspek pelaksanaan tugas audit internal secara keseluruhan telah terpenuhi. Struktur dan Infrastruktur pada aspek audit eksternal telah memadai. Struktur dan Infrastruktur penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud berjalan dengan sebagian terpenuhi secara keseluruhan. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan cukup terpenuhi secara keseluruhan. Struktur dan Infrastruktur integritas pelaporan dan sistem teknogi informasi pada bpr saat ini dinilai sebagian terpenuhi secara keseluruhan.</p>
<p>B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, BPR tergolong cukup baik. Bpr memili proses penerapan tata kelola dalam upaya pengembangan,pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi dengan kondisi belum terpenuhi secara keseluruhan. 2. Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai cukup baik. Manajemen Bpr menilai proses penerapan tata kelola pada aspe benturan kepentiangn memadai. Manajemn bpr menilai pada proses penerapan tata kelola dari penerapan tugas audit internal secara umum cukup memadai. Manajemen bpr menilai bahwa pelaksanaan proses tata kelola pada aspek audit eksternal dinilai cukup baik. Proses penerapan tata kelola,penerapan manajemen risiko dan anti

fraud yang dimiliki BPR cukup memadai. Proses Penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit secara umum cukup memadai, tanpa adanya pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dinilai cukup memadai.
2. Hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dinilai kurang memadai.
3. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, yaitu Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR dinilai masih kurang memadai.

Pandeglang, 18 Juli 2025

PT. BPR BERKAH (Perseroda)


KIKI DIKDUL HUDA, S.E
DIREKTUR KEPATUHAN

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)


H. JAENUDIN, S.E
DIREKTUR UTAMA


H.J. NURIAH, SKM, M.Si
ANGGOTA KOMISARIS

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
DEWAN KOMISARIS


Drs. DONI HERMAWAN
KOMISARIS UTAMA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT. BPR BERKAH (Perseroda) Semester I Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR BERKAH (Perseroda) selama semester I tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Pandeglang, 18 Juli 2025

PT. BPR BERKAH (Perseroda)



KIKI DIKDUL HUDA, S.E
DIREKTUR KEPATUHAN

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)



H. JAENUDIN, S.E
DIREKTUR UTAMA



H.J. NURIAH, SKM, M.SI.
ANGGOTA KOMISARIS

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
DEWAN KOMISARIS



Drs. DONI HERMAWAN
KOMISARIS UTAMA

KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER I TAHUN 2025

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</i>
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, PT.BPR Berkah tergolong baik.</i>
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pemantauan terhadap perkembangan PT.BPR Berkah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, berjalan dengan baik.</i>
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Cukup Baik	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, BPR tergolong cukup baik.</i>

6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada PT.BPR Berkah berada dalam kondisi baik.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Sangat Baik	Indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, pada PT.BPR Berkah berada dalam kondisi baik.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Baik	Manajemen PT.BPR Berkah telah menilai bahwa indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, berjalan dengan baik.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada PT.BPR Berkah saat ini dinilai baik.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Baik	PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	7 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A.	Struktur dan Infrastruktur

1)	Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, PT.BPR Berkah tergolong baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pemantauan terhadap perkembangan PT.BPR Berkah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, berjalan dengan baik. 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada PT.BPR Berkah berada dalam kondisi baik. 4. Indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, BPR tergolong cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, pada PT.BPR Berkah berada dalam kondisi baik. 2. Manajemen PT.BPR Berkah telah menilai bahwa indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, berjalan dengan baik. 3. Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada PT.BPR Berkah saat ini dinilai baik. 4. PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada PT.BPR Berkah indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dinilai telah terpenuhi.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki PT.BPR Berkah dinilai telah terpenuhi.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR dinilai telah terpenuhi.

6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	<i>PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian PT.BPR Berkah dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah Terpenuhi	<i>Penilaian terhadap indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai PT.BPR Berkah, yang dimiliki PT.BPR Berkah adalah telah terpenuhi.</i>
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Implementasi indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di PT.BPR Berkah menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</i>
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Telah Terpenuhi	<i>Dalam upaya pengembangannya, PT.BPR Berkah memiliki indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan PT.BPR Berkah sesuai dengan ketentuan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki PT.BPR Berkah dinilai baik.</i>

11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Sangat Baik	Berdasarkan hasil penilaian, PT.BPR Berkah memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dengan penilaian sangat baik.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Baik	Indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, pada BPR indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, dinilai baik.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, PT.BPR Berkah memiliki indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, pada PT.BPR Berkah dinilai baik.

16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi tidak menggunakan PT.BPR Berkah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT.BPR Berkah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, PT.BPR Berkah tergolong baik.</i>
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Sangat Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan pencapaian sangat baik.</i>
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, PT.BPR Berkah memiliki indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis PT.BPR Berkah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi PT.BPR Berkah dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, dengan pencapaian baik.</i>
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	Baik	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham PT.BPR Berkah, BPR tergolong baik.</i>

20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Baik	<i>PT.BPR Berkah memiliki indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dinilai baik.</i>
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Baik	<i>Implementasi indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, di PT.BPR Berkah menunjukkan kondisi baik.</i>
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Sangat Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR dinilai sangat baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki PT.BPR Berkah adalah baik.</i>
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Baik	<i>PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, dengan penilaian baik.</i>
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Baik	<i>Indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR saat ini dinilai baik.</i>

26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Baik	<i>Indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, pada BPR indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dinilai baik.</i>
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.</i>
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki PT.BPR Berkah dinilai baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	15 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.</p> <p>c. Direksi telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada PT.BPR Berkah indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dinilai telah terpenuhi. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki PT.BPR Berkah dinilai telah terpenuhi. PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham

	<p>sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 6. PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian PT.BPR Berkah dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, dengan penilaian telah terpenuhi. 7. Penilaian terhadap indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai PT.BPR Berkah, yang dimiliki PT.BPR Berkah adalah telah terpenuhi. 8. Implementasi indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di PT.BPR Berkah menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 9. Dalam upaya pengembangannya, PT.BPR Berkah memiliki indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan PT.BPR Berkah sesuai dengan ketentuan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	<p>Struktur dan Infrastruktur dalam upaya pengembangannya, bpr memili struktur dan infrstruktur pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi dengan pencapaian belum terpenuhi secara keseluruhan.</p>
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki PT.BPR Berkah dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, PT.BPR Berkah memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dengan penilaian sangat baik. 3. Indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, pada BPR indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, dinilai baik. 4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 5. Dalam upaya pengembangannya, PT.BPR Berkah memiliki indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik. 6. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu

	<p>dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, pada PT.BPR Berkah dinilai baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi tidak menggunakan PT.BPR Berkah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT.BPR Berkah, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, PT.BPR Berkah tergolong baik. 8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan pencapaian sangat baik. 9. Dalam upaya pengembangannya, PT.BPR Berkah memiliki indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis PT.BPR Berkah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi PT.BPR Berkah dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, dengan pencapaian baik. 10. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham PT.BPR Berkah, BPR tergolong baik. 11. PT.BPR Berkah memiliki indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dinilai baik. 12. Implementasi indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, di PT.BPR Berkah menunjukkan kondisi baik. 13. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	Bpr memili proses penerapan tata kelola dalam upaya pengembangan,pelaksaan tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi dengan kondisi belum terpenuhi secara keseluruhan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki PT.BPR Berkah adalah baik. 2. PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, dengan penilaian baik. 3. Indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR saat ini dinilai baik. 4. Indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, pada BPR indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dinilai baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang

	dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik. 6. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki PT.BPR Berkah dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Manajemen bpr secara umum telah melakukan pelaksanaan tata kelola pada aspek pelaksanaan tugas tanggung jawab dan wewenang direksi secara umum cukup baik, hal ini dapat tercermin dari pemenuhan cukup memadai atas prinsip tata kelola.

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>BPR memiliki indikator Jumlah anggota Komisaris utama dan Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Jumlah anggota Komisaris utama dan Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.</i>
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.</i>
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.</i>

6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Tidak Dinilai	<i>BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</i>
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</i>
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan pencapaian telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>

10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Baik	<i>Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, dinilai baik.</i>
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Sangat Baik	<i>BPR memiliki indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dinilai sangat baik.</i>
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>

13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, berjalan dengan baik.</i>
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, berjalan dengan baik.</i>
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sangat Baik	<i>Indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dinilai sangat baik.</i>
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang dinilai baik.</i>

17	<p>Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	Baik	<p><i>BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dinilai baik.</i></p>
18	<p>Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</p>	Baik	<p><i>Indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik.</i></p>
19	<p>Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p>	Cukup Baik	<p><i>Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</i></p>
20	<p>Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.</p>	Tidak Dinilai	<p><i>BPR tidak menilai indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris</i></p>

21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dinilai baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR berada dalam kondisi baik.</i>
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.</i>
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Baik	<i>Indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, pada BPR indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, dinilai baik.</i>
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>Indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.</i>

26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	<i>Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dinilai baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		7 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		14 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR memiliki indikator Jumlah anggota Komisaris utama dan Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Jumlah anggota Komisaris utama dan Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. 4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 5. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 6. BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen 7. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan pencapaian telah terpenuhi.

2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, dinilai baik. 3. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dinilai sangat baik. 4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai baik. 5. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, berjalan dengan baik. 6. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, berjalan dengan baik. 7. Indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dinilai sangat baik. 8. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang dinilai baik. 9. BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, indikator Anggota Dewan

	<p>Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dinilai baik.</p> <p>10. Indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik.</p> <p>11. BPR tidak menilai indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris</p> <p>12. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p> <p>2. BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.</p> <p>3. Indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, pada BPR indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, dinilai baik.</p> <p>4. Indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.</p> <p>5. Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Tidak Dinilai	BPR tidak menilai indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Tidak Dinilai	BPR tidak menilai indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Tidak Dinilai	BPR tidak menilai indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko

6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</i>
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</i>
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi</i>
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris</i>
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			2 Indikator

Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Nilai Faktor yang Dipilih:	Tidak Dinilai

Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Nilai Faktor
<i>Tidak Dinilai</i>

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, dengan pencapaian baik.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPR dinilai baik.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, berjalan dengan baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		4 Indikator	

Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.</p> <p>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.</p> <p>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Struktur dan Infrastruktur tata kelola pada aspek benturan kepentingan secara umum telah memadai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan

	yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	Manajemen Bpr menilai proses penerapan tata kelola pada aspe benturan kepentingan memadai.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, dengan pencapaian baik.2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPR dinilai baik.3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, berjalan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	Penerapan tata kelola pada aspek benturan kepentingan secara keseluruhan sudah memenuhi ketentuan dengan baik.

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan penilaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Sangat Baik	Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.

6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Cukup Baik	<i>Indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, pada BPR indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dinilai cukup baik.</i>
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/ atau menginikasikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikasikan pedoman

	<p>kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</p> <p>4. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.</p> <p>2. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR adalah baik.</p> <p>3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, pada BPR indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dinilai cukup baik.

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</i>
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, berjalan dengan telah terpenuhi.</i>
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</i>
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	<i>BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dinilai telah terpenuhi.</i>
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	<i>BPR memiliki indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dinilai telah terpenuhi.</i>

B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, berjalan dengan baik.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Tidak Dinilai	BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, berjalan dengan baik.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dimiliki BPR dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	Baik	Indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator

Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib

	<p>kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, berjalan dengan telah terpenuhi.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</p> <p>4. BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dinilai telah terpenuhi.</p> <p>5. BPR memiliki indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dinilai telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	Struktur dan Infrastruktur pada aspek pelaksanaan tugas audit internal secara keseluruhan telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, berjalan dengan baik.</p> <p>2. BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern</p> <p>3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, berjalan dengan baik.</p> <p>4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Manajemn bpr menilai pada proses penerapan tata kelola dari penerapan tugas audit internal secara umum cukup memadai.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.</p> <p>2. Indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif

Bpr dalam penerapan tata kelola pada aspek tugas audit internal secara umum sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.
--

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sangat Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), berjalan dengan sangat baik.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sangat Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	Indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPR indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dinilai baik.

5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
---	---	-------------	--

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:
 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	

1)	Faktor Positif	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif	Struktur dan Infrastruktur pada aspek audit eksternal telah memadai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), berjalan dengan sangat baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
2)	Faktor Negatif	Manajemen bpr menilai bahwa pelaksanaan proses tata kelola pada aspek audit eksternal dinilai cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	1. Indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPR indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif	Dalam pelaksanaan tata kelola bpr pada aspek audit eksternal telah memenuhi sesuai ketentuan, adapun beberapa hal yang menjadi perhatian waktu penyelesaian pengerjaan laporan sedikit terkendala.

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
3	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Indikator BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.

5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, berjalan dengan baik.</i>
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Baik	<i>Implementasi indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian baik.</i>
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Implementasi indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>

10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, berjalan dengan baik.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR dinilai baik.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Baik	BPR memiliki indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, yang dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, dengan penilaian baik.</i>
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</i>
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Cukup Baik	<i>BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dinilai cukup baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	13 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik

Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.</p> <p>b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.</p> <p>3. Indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	Struktur dan Infrastruktur penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud berjalan dengan sebagian terpenuhi secara keseluruhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	

1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik. 2. Penilaian terhadap indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR adalah baik. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, berjalan dengan baik. 4. Implementasi indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, di BPR menunjukkan kondisi baik. 5. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian baik. 6. Implementasi indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik. 7. BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 8. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, berjalan dengan baik. 9. BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 10. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR dinilai baik. 11. BPR memiliki indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, yang dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Proses penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko dan anti fraud yang dimiliki Bpr cukup memadai.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif

	<ol style="list-style-type: none">1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, dengan penilaian baik.2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola secara umum cukup baik.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	Sangat Baik	Penilaian terhadap indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Baik	Indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, pada BPR indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan cukup terpenuhi secara keseluruhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Penilaian terhadap indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.</p> <p>2. Indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, pada BPR indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Proses Penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit secara umum cukup memadai, tanpa adanya pelampauan Batas Maksimu Pemberian Kredit.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian terhadap indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.2. Penilaian terhadap indikator BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	Penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit secara umum cukup memadai, tanpa adanya pelanggaran Batas Maksimu Pemberian Kredit.

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dengan penilaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Sangat Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pencapaian sangat baik.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.

6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan sangat baik.</i>
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Implementasi indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Cukup Baik	<i>Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Baik	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR berada dalam kondisi baik.</i>

11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Cukup Baik	<i>Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		4 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR telah memiliki dan menginikasikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR telah mengimplementasikan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi. 2. Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dengan penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Struktur dan Infrastruktur integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi pada bpr saat ini dinilai sebagian terpenuhi secara keseluruhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pencapaian sangat baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa

	<p>Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.</p> <p>3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan sangat baik.</p> <p>4. Implementasi indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p> <p>5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p> <p>2. Penilaian terhadap indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</p>

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, dengan penilaian telah terpenuhi.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Baik	BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, yang dinilai baik.

5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, pada BPR berada dalam kondisi baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Kurang Baik	<i>BPR memiliki indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dinilai kurang baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 (Cukup Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian.</p>	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, dengan penilaian telah terpenuhi. Indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. Implementasi indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, yang dinilai baik. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2)	Faktor Negatif

	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	1. BPR memiliki indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dinilai kurang baik.

Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 3 (Cukup Memadai)
Modus Nilai Faktor		Nilai 2
Median Nilai Faktor		Nilai 2
Rata-rata Nilai Faktor		Nilai 2.09
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
<ol style="list-style-type: none"> Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan

- berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
6. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
 7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
 8. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
 9. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
 10. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
 11. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian memadai.
2. Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi memadai.
3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris BPR tergolong memadai.
4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan BPR tergolong memadai.
5. Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai memadai.
6. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern di BPR menunjukkan kondisi memadai.
7. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern berjalan dengan sangat memadai.
8. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian memadai.
9. Proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini dinilai memadai.
10. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan memadai.
11. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR adalah memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan memadai.
5. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai memadai.
6. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah memadai.
7. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai memadai.
8. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit hasil penerapan tata

kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dinilai memadai.

9. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan penilaian memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

Struktur dan Infrastruktur dalam upaya pengembangannya, bpr memiliki struktur dan infrastruktur pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi dengan pencapaian belum terpenuhi secara keseluruhan. Struktur dan Infrastruktur tata kelola pada aspek benturan kepentingan secara umum telah memadai. Struktur dan Infrastruktur pada aspek pelaksanaan tugas audit internal secara keseluruhan telah terpenuhi. Struktur dan Infrastruktur pada aspek audit eksternal telah memadai. Struktur dan Infrastruktur penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud berjalan dengan sebagian terpenuhi secara keseluruhan. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan cukup terpenuhi secara keseluruhan. Struktur dan Infrastruktur integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi pada bpr saat ini dinilai sebagian terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, BPR tergolong cukup baik. Bpr memiliki proses penerapan tata kelola dalam upaya pengembangan, pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi dengan kondisi belum terpenuhi secara keseluruhan.
2. Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai cukup baik. Manajemen Bpr menilai proses penerapan tata kelola pada aspek benturan kepentingan memadai. Manajemen bpr menilai pada proses penerapan tata kelola dari penerapan tugas audit internal secara umum cukup memadai. Manajemen bpr menilai bahwa pelaksanaan proses tata kelola pada aspek audit eksternal dinilai cukup baik. Proses penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko dan anti fraud yang dimiliki Bpr cukup memadai. Proses Penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit secara umum cukup memadai, tanpa adanya pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit. Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dinilai cukup memadai.
2. Hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dinilai kurang memadai.
3. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, yaitu Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR dinilai masih kurang memadai.

Nomor : 463.1 /PT.BPR.BRH/VII/2025
Tanggal : 18 Juli 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten

Jl. Letnan Djidun No. 35 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang, Kota Serang

Perihal : **Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**

Referensi:

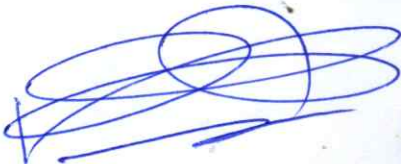
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkotaan, Bank Desa, Bank Perkotaan Syariah dan Bank Perkotaan Syariah Syariah tanggal 1 Juli 2024
2. Surat Edaran OJK No. 8/ SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkotaan, Bank Desa, Bank Perkotaan Syariah dan Bank Perkotaan Syariah Syariah tanggal 26 Mei 2025

Menunjuk perihal dan referensi tersebut di atas dengan ini kami sampaikan Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pandeglang, 18 Juli 2025

PT. BPR BERKAH (Perseroda)



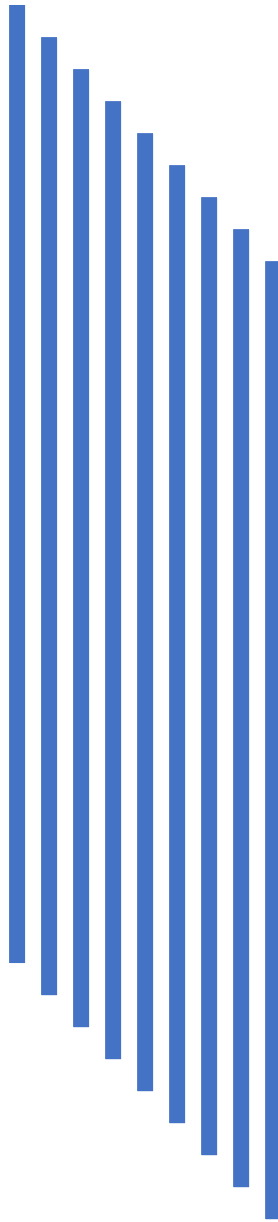
 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)

KIKI DIKDUL HUDA,S.E
DIREKTUR KEPATUHAN



BANK BPR BERKAH
PT. BPR BERKAH (Perseroda)

LAPORAN POKOK PELAKSANAAN ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN SEMESTER I TAHUN 2025



TAHUN 2025

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
<hr/>	
A. Pendahuluan	
<hr/>	
A.1. Formasi Sumber Daya Manusia	2
<hr/>	
A.2. Ketentuan Internal yang Dimiliki	5
<hr/>	
B. Informasi mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	
<hr/>	
B.1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan	21
<hr/>	
B.2. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	27
<hr/>	
B.3. Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	28
<hr/>	
B.4. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas	29
<hr/>	
C. Penutup dan Pengesahan	38
<hr/>	

Pendahuluan

Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS tanggal 01 Juli 2024 dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi YMF Kepatuhan disusun mengacu pada format yang disediakan pada SEOJK No. 8 Tahun 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPRS.

Informasi Umum Perusahaan

Nama BPR/BPRS	PT. BPR BERKAH (Perseroda)
Nomor Telepon	(0253)5550095
Alamat BPR/BPRS	JL. MAYOR WIDAGDO KABAYAN PANDEGLANG

A.1.

Formasi Sumber Daya Manusia

Formasi Sumber Daya Manusia pada PT. BPR BERKAH (Perseroda) adalah sebagai berikut:

Formasi Sumber Daya Manusia:

1.	Nama	Drs.DONI HERMAWAN
	NIK	3601211506700004
	Jabatan	Komisaris utama
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	12 Januari 2023
	Lama Masa Jabatan	2 TAHUN 5 BULAN
2.	Nama	HJ. NURIAH,SKM,M.SI.
	NIK	3601204805660001
	Jabatan	Komisaris
	Status Kepegawaian	Pengangkatan Baru
	Tingkat Pendidikan	S2
	Tanggal Pengangkatan	24 Juni 2025
	Lama Masa Jabatan	0 TAHUN 0 BULAN
3.	Nama	H. JAENUDIN,S.E
	NIK	3601141003620002
	Jabatan	Direktur utama
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	09 November 2021
	Lama Masa Jabatan	3 TAHUN 8 BULAN

4.	Nama	KIKI DIKDUL HUDA,S.E
	NIK	3601141408830000
	Jabatan	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	09 November 2021
	Lama Masa Jabatan	3 TAHUN 8 BULAN
5.	Nama	INDRA MAULANA,S.E
	NIK	3601190505830007
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	01 Januari 2023
	Lama Masa Jabatan	2 TAHUN 6 BULAN
6.	Nama	AJAN SUBAGJA
	NIK	3601102308690000
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	01 Januari 2017
	Lama Masa Jabatan	8 TAHUN 6 BULAN
7.	Nama	IMAN SETIADI
	NIK	3601212705860000
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1

	Tanggal Pengangkatan	01 Januari 2020
	Lama Masa Jabatan	5 TAHUN 6 BULAN
8.	Nama	HEPRI,S.E
	NIK	3601341807870000
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	31 Desember 2024
	Lama Masa Jabatan	0 TAHUN 6 BULAN
9.	Nama	IWAN KURNIAWAN
	NIK	3601130108740000
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Audit Intern
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	31 Desember 2024
	Lama Masa Jabatan	0 TAHUN 6 BULAN

Dengan perencanaan Sumber Daya Manusia yang baik, PT.BPR BERKAH (Perseroda) dapat memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi BPR BERKAH.

A.2.

Ketentuan Internal yang Dimiliki

Dengan adanya ketentuan internal yang jelas dan efektif, organisasi dapat beroperasi dengan lebih baik, mencapai tujuannya, dan menjaga Integritas serta membangun kepercayaan dari pemangku kepentinganreputasinya.

Ketentuan internal membantu menjaga integritas organisasi dan anggotanya, serta membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Daftar Ketentuan Internal yang Dimiliki:

1.	Judul Ketentuan	SK Tentang Remunerasi Dewan Komisaris
	Nomor Ketentuan Internal	05/SK.Dekom/PT.BPR.BRH/III/2023
	Tanggal Pemberlakuan	13 Maret 2023
	Keterangan	Operasional
2.	Judul Ketentuan	SK Tantiem, Jasa Produksi dan Dana Kesejahteraan
	Nomor Ketentuan Internal	74/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2024
	Tanggal Pemberlakuan	02 Mei 2024
	Keterangan	Operasional
3.	Judul Ketentuan	SK Pemberian Subsidi awal pembukaan rek perangkat desa
	Nomor Ketentuan Internal	1.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2022
	Tanggal Pemberlakuan	03 Januari 2022
	Keterangan	Operasional
4.	Judul Ketentuan	SK Tunjangan hari Raya Bagi Pengurus dan pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	22/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Februari 2025
	Keterangan	Operasional

5.	Judul Ketentuan	SK Hak Cuti dan Tunjangan Cuti Direksi dan Pegawai
	Nomor Ketentuan Internal	27/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
6.	Judul Ketentuan	SK Gaji Pokok Bagi Pegawai
	Nomor Ketentuan Internal	11/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2023
	Tanggal Pemberlakuan	27 Januari 2023
	Keterangan	Operasional
7.	Judul Ketentuan	SK Pemberian Pulsa Telepon Bagi Pengurus dan Pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	26/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Januari 2025
	Keterangan	Operasional
8.	Judul Ketentuan	SK Penyediaan/ Pencadangan dana studi banding
	Nomor Ketentuan Internal	33/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Januari 2025
	Keterangan	Operasional
9.	Judul Ketentuan	SK Dana Sumbangan
	Nomor Ketentuan Internal	41/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	14 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
10.	Judul Ketentuan	SK Biaya Akomodasi dan Uang Saku Perjalanan
	Nomor Ketentuan Internal	31/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional

11.	Judul Ketentuan	SK Jam lembur dan uang lembur
	Nomor Ketentuan Internal	30/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
12.	Judul Ketentuan	SK Batas Pengeluaran Uang
	Nomor Ketentuan Internal	32/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
13.	Judul Ketentuan	Biaya penagihan/ pembinaan/ monitoring kredit/pick up
	Nomor Ketentuan Internal	25/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
14.	Judul Ketentuan	SK Kompensasi Gaji Ke - 13
	Nomor Ketentuan Internal	29/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
15.	Judul Ketentuan	SK Rekreasi Bagi Pengurus dan Pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	31.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	20 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
16.	Judul Ketentuan	SK Dana Pendidikan Bagi Pengurus dan Pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	23/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
17.	Judul Ketentuan	SK Insentif Akhir tahun Bagi Pengelola

	Nomor Ketentuan Internal	73/SK.Dir/PT.BPR.BRH/IV/2022
	Tanggal Pemberlakuan	18 April 2022
	Keterangan	Operasional
18.	Judul Ketentuan	SK Penilaian Kinerja Pegawai
	Nomor Ketentuan Internal	20/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
19.	Judul Ketentuan	SK Hari dan Jam Kerja
	Nomor Ketentuan Internal	37/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
20.	Judul Ketentuan	SK Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
	Nomor Ketentuan Internal	42/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	14 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
21.	Judul Ketentuan	SK Pemberian Uang Saku Rapat Dinas
	Nomor Ketentuan Internal	38/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	14 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
22.	Judul Ketentuan	SK Batas Maksimum Penyimpanan Uang Di Kantor Pusat
	Nomor Ketentuan Internal	45/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	28 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
23.	Judul Ketentuan	SK Penetapan dan Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai

	Nomor Ketentuan Internal	01/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/205
	Tanggal Pemberlakuan	03 Januari 2025
	Keterangan	Operasional
24.	Judul Ketentuan	SK Wewenang Pengisian Spesimen Tanda Tangan PPBL
	Nomor Ketentuan Internal	52.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2022
	Tanggal Pemberlakuan	04 Maret 2022
	Keterangan	Operasional
25.	Judul Ketentuan	Penetapan Dana Pesangon Bagi Pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	20/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2022
	Tanggal Pemberlakuan	03 Januari 2022
	Keterangan	Operasional
26.	Judul Ketentuan	SK Biaya Kegiatan Non Rutin / Insidental
	Nomor Ketentuan Internal	21.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2022
	Tanggal Pemberlakuan	07 Januari 2022
	Keterangan	Operasional
27.	Judul Ketentuan	SK Hak Akses Menu Pada Aplikasi Inti Perbankan
	Nomor Ketentuan Internal	112/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XI/2023
	Tanggal Pemberlakuan	24 November 2023
	Keterangan	Operasional
28.	Judul Ketentuan	SK Sumbangan Kepada Pengurus dan Pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	43/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	15 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
29.	Judul Ketentuan	SOP Pengeluaran biaya

	Nomor Ketentuan Internal	48/SK.Dir/PT.BPR.BRH/IV/2023
	Tanggal Pemberlakuan	03 April 2023
	Keterangan	Operasional
30.	Judul Ketentuan	SK Tanggungjawab Sosial Lingkungan / CSR
	Nomor Ketentuan Internal	53.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2022
	Tanggal Pemberlakuan	04 Maret 2022
	Keterangan	Operasional
31.	Judul Ketentuan	SK Pedoman Transaksi Pemindahbukuan
	Nomor Ketentuan Internal	114.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2022
	Tanggal Pemberlakuan	24 Mei 2022
	Keterangan	Operasional
32.	Judul Ketentuan	SOP Aktiva Tetap dan Inventaris
	Nomor Ketentuan Internal	72/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2022
	Tanggal Pemberlakuan	18 Mei 2022
	Keterangan	Operasional
33.	Judul Ketentuan	SK Penunjukan PA, KPA & Pejabat Pengadaan
	Nomor Ketentuan Internal	38/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	28 Februari 2023
	Keterangan	Operasional
34.	Judul Ketentuan	SK Penggunaan Layanann Cash Management System (CMS)
	Nomor Ketentuan Internal	131/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	17 Desember 2024
	Keterangan	Operasional
35.	Judul Ketentuan	SK Batas Kewenangan Persetujuan Transaksi Non Tunai PPBL
	Nomor Ketentuan Internal	130/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XI/2025

	Tanggal Pemberlakuan	17 Desember 2024
	Keterangan	Operasional
36.	Judul Ketentuan	SK Pembentukan panitia lelang dan pemusnah barang inventaris
	Nomor Ketentuan Internal	91.2/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	15 Agustus 2024
	Keterangan	Operasional
37.	Judul Ketentuan	SK Penjualan barang inventaris
	Nomor Ketentuan Internal	91.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XI/2024
	Tanggal Pemberlakuan	15 Agustus 2024
	Keterangan	Operasional
38.	Judul Ketentuan	Pedoman Penghapusan dan pemusnah barang inventaris di lingkungan BPR BERKAH
	Nomor Ketentuan Internal	75/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	10 April 2024
	Keterangan	Operasional
39.	Judul Ketentuan	SK Penunjukan Pegawai Penanggung Jawab Pelaporan Laporan Ke (OJK)
	Nomor Ketentuan Internal	21/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
40.	Judul Ketentuan	SK Penunjukan Pegawai Penanggung Jawab Integritas Laporan Keuangan
	Nomor Ketentuan Internal	11/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2025
	Tanggal Pemberlakuan	09 Januari 2025
	Keterangan	Operasional
41.	Judul Ketentuan	Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif

	Nomor Ketentuan Internal	132/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	17 Desember 2024
	Keterangan	Kredit
42.	Judul Ketentuan	Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja
	Nomor Ketentuan Internal	131.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	17 Desember 2024
	Keterangan	Kredit
43.	Judul Ketentuan	SK Ketentuan Restrukturisasi Kredit Pada Debitur
	Nomor Ketentuan Internal	47/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2025
	Tanggal Pemberlakuan	01 Maret 2025
	Keterangan	Kredit
44.	Judul Ketentuan	Pedoman Transaksi Pencairan Kredit
	Nomor Ketentuan Internal	10/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2022
	Tanggal Pemberlakuan	10 Januari 2022
	Keterangan	Kredit
45.	Judul Ketentuan	SOP Permintaan Data Slik
	Nomor Ketentuan Internal	93/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
46.	Judul Ketentuan	SK Pembentukan Komite Kredit
	Nomor Ketentuan Internal	87/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
47.	Judul Ketentuan	SK Batas Maksimum Pemberian Kredit dari Sumber Gaji dan atau Tunjangan

	Nomor Ketentuan Internal	89/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
48.	Judul Ketentuan	SK Batas Maksimum Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan
	Nomor Ketentuan Internal	46/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2025
	Tanggal Pemberlakuan	01 Maret 2025
	Keterangan	Kredit
49.	Judul Ketentuan	SK Ketentuan jangka waktu, suku bunga, provisi dan adm kredit
	Nomor Ketentuan Internal	88/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
50.	Judul Ketentuan	SK Insentif Penyelesaian Kredit Bermasalah
	Nomor Ketentuan Internal	57/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2025
	Tanggal Pemberlakuan	13 Maret 2025
	Keterangan	Kredit
51.	Judul Ketentuan	SK Insentif Pemasaran kredit
	Nomor Ketentuan Internal	54/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Maret 2025
	Keterangan	Kredit
52.	Judul Ketentuan	SK Pembayaran Kredit dibayar sekaligus
	Nomor Ketentuan Internal	53/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Maret 2025
	Keterangan	Kredit
53.	Judul Ketentuan	SK Fasilitas kredit bagi pengurus dan pengelola

	Nomor Ketentuan Internal	04/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2025
	Tanggal Pemberlakuan	06 Januari 2025
	Keterangan	Kredit
54.	Judul Ketentuan	SK Pelaporan SLIK
	Nomor Ketentuan Internal	38/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/20119
	Tanggal Pemberlakuan	08 Maret 2019
	Keterangan	Kredit
55.	Judul Ketentuan	Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan (PKPB)
	Nomor Ketentuan Internal	80.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	23 Mei 2025
	Keterangan	Kredit
56.	Judul Ketentuan	SOP Pemberian Kredit Anggota DPRD
	Nomor Ketentuan Internal	125/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	27 Desember 2023
	Keterangan	Kredit
57.	Judul Ketentuan	SK Bunga,Provisi,Asuransi & Biaya ADM Fasilitas Pinjaman Anggota DPRD
	Nomor Ketentuan Internal	81/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	23 Mei 2025
	Keterangan	Kredit
58.	Judul Ketentuan	SK Penetapan Kewenangan Pemutusan Pemberian Kredit
	Nomor Ketentuan Internal	74/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	14 Mei 2025
	Keterangan	Kredit
59.	Judul Ketentuan	SK Batas Maksimum Pemberian Kredit

	Nomor Ketentuan Internal	84/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
60.	Judul Ketentuan	SK Analisa Kredit Dalam Pemberian Pinjaman
	Nomor Ketentuan Internal	90/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
61.	Judul Ketentuan	SK Penilaian Agunan
	Nomor Ketentuan Internal	92/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
62.	Judul Ketentuan	SK Kredit Back To Back
	Nomor Ketentuan Internal	132.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	17 Desember 2024
	Keterangan	Kredit
63.	Judul Ketentuan	SK Penerapan Kualitas Aset BPR Berdasarkan CKPN
	Nomor Ketentuan Internal	226/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	28 Desember 2024
	Keterangan	Kredit
64.	Judul Ketentuan	SOP Tabungan
	Nomor Ketentuan Internal	78/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XIII/2023
	Tanggal Pemberlakuan	02 Agustus 2023
	Keterangan	Dana
65.	Judul Ketentuan	SOP Deposito
	Nomor Ketentuan Internal	34/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	28 Februari 2023

	Keterangan	Dana
66.	Judul Ketentuan	SOP Tabungan Berjangka
	Nomor Ketentuan Internal	33/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	28 Februari 2023
	Keterangan	Dana
67.	Judul Ketentuan	SK Ketentuan suku bunga & biaya ADM Dana Pihak Ketiga
	Nomor Ketentuan Internal	80/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	23 Mei 2025
	Keterangan	Dana
68.	Judul Ketentuan	SK Insentif pemasaran deposito
	Nomor Ketentuan Internal	18/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	13 Februari 2023
	Keterangan	Dana
69.	Judul Ketentuan	SK Ketentuan Penutupan Rekening Pasif/ Dorman
	Nomor Ketentuan Internal	99/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	28 Januari 2023
	Keterangan	Dana
70.	Judul Ketentuan	SOP Pelayanan Nasabah CS
	Nomor Ketentuan Internal	36/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	28 Februari 2023
	Keterangan	Dana
71.	Judul Ketentuan	SK Penetapan Kewenangan Persetujuan Limit Deposito
	Nomor Ketentuan Internal	376SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	14 Mei 2025

	Keterangan	Dana
72.	Judul Ketentuan	SOP Simarmas Berkah
	Nomor Ketentuan Internal	15/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	03 Februari 2025
	Keterangan	Dana
73.	Judul Ketentuan	Program Cashback Deposito Berkah
	Nomor Ketentuan Internal	96/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	17 Mei 2025
	Keterangan	Dana
74.	Judul Ketentuan	SK Disiplin pegawai
	Nomor Ketentuan Internal	36/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Februari 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
75.	Judul Ketentuan	SK Tim Pertimbangan Pemberian Sanksi
	Nomor Ketentuan Internal	39/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Februari 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
76.	Judul Ketentuan	SK Struktur organisasi
	Nomor Ketentuan Internal	71/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	09 Mei 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
77.	Judul Ketentuan	SK Pembentukan UKK APU & PPT
	Nomor Ketentuan Internal	02/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2025
	Tanggal Pemberlakuan	02 Januari 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
78.	Judul Ketentuan	Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

	Nomor Ketentuan Internal	24/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	14 Februari 2023
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
79.	Judul Ketentuan	Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi
	Nomor Ketentuan Internal	23/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	14 Februari 2023
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
80.	Judul Ketentuan	SOP APU PPT dan PPPSPM
	Nomor Ketentuan Internal	39/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	03 Desember 2024
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
81.	Judul Ketentuan	Pedoman Manajemen Risiko
	Nomor Ketentuan Internal	85/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Mei 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
82.	Judul Ketentuan	SOP Kepatuhan
	Nomor Ketentuan Internal	79/SOP.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	22 Mei 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
83.	Judul Ketentuan	Pedoman Pengaturan Kepentingan
	Nomor Ketentuan Internal	91/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
84.	Judul Ketentuan	SK Pembentukan Unit Pengaduan Konsumen
	Nomor Ketentuan Internal	05.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2025
	Tanggal Pemberlakuan	08 Februari 2025

	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
85.	Judul Ketentuan	SOP Perlindungan Konsumen
	Nomor Ketentuan Internal	161/SOP.Dir/PT.BPR.BRH/IX/2024
	Tanggal Pemberlakuan	27 November 2024
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
86.	Judul Ketentuan	Pedoman Penyelenggaraan Produk BPR
	Nomor Ketentuan Internal	04.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2024
	Tanggal Pemberlakuan	08 Januari 2024
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
87.	Judul Ketentuan	SOP Layanan Pindah Dana Melalui API
	Nomor Ketentuan Internal	166.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2022
	Tanggal Pemberlakuan	01 Desember 2022
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
88.	Judul Ketentuan	Pedoman Teknologi Informasi
	Nomor Ketentuan Internal	53/SK.Dir/PT.BPR.BRH/IV/2023
	Tanggal Pemberlakuan	13 Juni 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
89.	Judul Ketentuan	SOP Strategi Anti Fraud
	Nomor Ketentuan Internal	126.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	01 Desember 2024
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
90.	Judul Ketentuan	UKK Anti Fraud
	Nomor Ketentuan Internal	04.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2025
	Tanggal Pemberlakuan	06 Januari 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
91.	Judul Ketentuan	SK Opini Review Kepatuhan

	Nomor Ketentuan Internal	129.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	06 Desember 2024
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
92.	Judul Ketentuan	SOP Rahasia Bank
	Nomor Ketentuan Internal	35/SK.SOP.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Februari 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
93.	Judul Ketentuan	SOP Integritas Laporan Keuangan
	Nomor Ketentuan Internal	12/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2024
	Tanggal Pemberlakuan	10 Januari 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan

Demikian kami sampaikan ketentuan internal yang dimiliki oleh BPR BERKAH. Dengan adanya penyesuaian, perusahaan dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan mencapai kinerja yang lebih baik.

B.1.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan di Sepanjang Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Daftar Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan:

1.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan Zoom informasi perkreditan dan kredit scoring
	Tanggal Pelaksanaan	03 Januari 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Jakarta
	Kategori Peserta	Seluruh pegawai
	Jumlah Peserta	4 orang
	Keterangan Peserta	Analisa kredit scoring
	Uraian Kegiatan: Dengan memahami konsep credit scoring dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, calon debitur dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam mengajukan pinjaman.	
2.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Sistem Informasi Penerapan Tata Kelola
	Tanggal Pelaksanaan	15 Januari 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Jakarta
	Kategori Peserta	Seluruh pegawai
	Jumlah Peserta	3 orang
	Keterangan Peserta	POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR/S
	Uraian Kegiatan: Implepentasi 12 Faktor selfassessment dan Tranparansi Tatakelola POJK Nomor 9 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/S	

3.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Sistem Informasi Pengendalian internal pelaporan keuangan
	Tanggal Pelaksanaan	16 Januari 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Jakarta
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	3 orang
	Keterangan Peserta	POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang integritas pelaporan keuangan bank
	<p>Uraian Kegiatan:</p> <p>Integritas informasi keuangan dan laporan keuangan menjadi salah satu hal utama yang harus diyakini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan serta untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pelaku pasar dan publik.</p>	
4.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Implementasi Rahasia Bank BPR/S
	Tanggal Pelaksanaan	18 Februari 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Lucas S.Muliawan, Drs.MBA.CRBD.CPHR.CHRM
	Kategori Peserta	Seluruh pegawai
	Jumlah Peserta	2 orang
	Keterangan Peserta	POJK Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank BPR/S
	<p>Uraian Kegiatan:</p> <p>Definisi dan cakupan rahasia bank serta mekanisme pembukaan rahasia bank dalam proses hukum peradilan dan perpajakan terkait dengan rahasia bank.</p>	
5.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan Online Training Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Aplikasi Digital
	Tanggal Pelaksanaan	06 Maret 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbamida Jawa Barat/Yene Pelangi
	Kategori Peserta	Seluruh pegawai

Jumlah Peserta	1 orang
Keterangan Peserta	POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Uraian Kegiatan:

Perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis dan perkembangan digitalisasi produk dan/ atau layanan di sektor jasa keuangan yang semakin pesat maka perlu didukung peningkatan aspek perlindungan konsumen dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan

6.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Workshop online SPT PPH OP dan SPT PPH Bagi industri BPR/S
	Tanggal Pelaksanaan	06 Maret 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Jakarta
	Kategori Peserta	Seluruh pegawai
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Implementasi Perpajakan

Uraian Kegiatan:

Penyusunan SPT PPh Orang Pribadi (OP) dan SPT PPh Badan bagi Industri BPR/ BPRS Tahun 2024

7.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Sistem Informasi pelaporan tahunan
	Tanggal Pelaksanaan	18 Maret 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Jakarta
	Kategori Peserta	Seluruh pegawai
	Jumlah Peserta	2 orang
	Keterangan Peserta	POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR/S

Uraian Kegiatan:

Untuk meningkatkan efisiensi pengawasan bank BPR/S melalui digitalisasi penyampaian laporan dan sejalan dengan perkembangan teknologi dalam kegiatan usaha industri

bank yang perlu menyajikan laporan secara lengkap, akurat.

8.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan Aplikasi Digital Sistem informasi laporan keberkelanjutan
	Tanggal Pelaksanaan	10 April 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Jakarta
	Kategori Peserta	Seluruh pegawai
	Jumlah Peserta	2 orang
	Keterangan Peserta	Dengan mengungkapkan informasi keberlanjutan, perusahaan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dan membangun kepercayaan dengan investor, pelanggan, dan masyarakat

Uraian Kegiatan:

Laporan ini memberikan informasi yang berharga bagi pemangku kepentingan dan membantu mendorong transparansi serta perbaikan berkelanjutan dalam kinerja perusahaan.

9.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan Online Audit Perkreditan BPR
	Tanggal Pelaksanaan	17 April 2025
	Pihak Pelaksana	Internal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Microfinance Learning Cente
	Kategori Peserta	Seluruh pegawai
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan auditor internal BPR dalam melakukan audit terhadap proses perkreditan.

Uraian Kegiatan:

Dengan mengikuti pelatihan audit perkreditan BPR yang berkualitas, diharapkan BPR dapat meningkatkan kualitas operasional, meminimalkan risiko, dan mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan.

10.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Sosialisasi penerapan aplikasi digital dalam pengeloan kredit CKPN BPR yang efektif
------------	-------------------------------	--

		dan efisien
Tanggal Pelaksanaan		29 April 2025
Pihak Pelaksana		Eksternal BPR/BPRS
Nama Pihak Pelaksana		PT. Palma Anugrah Sejahtera
Kategori Peserta		Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS bagi BPR Syariah
Jumlah Peserta		1 orang
Keterangan Peserta		Implementasi Pengelolaan Kredit CKPN bagi BPR/S

Uraian Kegiatan:

Implementasi ini memerlukan pemahaman yang baik tentang metode perhitungan CKPN, baik secara individual maupun kolektif, serta kesiapan sistem dan sumber daya manusia di BPR/S.

11.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Kompetensi / Assesment Kabag dan PE
	Tanggal Pelaksanaan	01 Juni 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Konsultan Rika Kartikasari
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	5 orang
	Keterangan Peserta	Untuk meningkatkan Integritas terhadap perusahaan.

Uraian Kegiatan:

Asesmen kompetensi mencakup penilaian terhadap pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) yang relevan dengan bidang yang dinilai.

12.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Workshop Audit Kredit
	Tanggal Pelaksanaan	12 Juni 2025
	Pihak Pelaksana	Internal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	LPPI dan Yayasan Perbarindo Jakarta
	Kategori Peserta	Seluruh pegawai
	Jumlah Peserta	1 orang

Keterangan Peserta

Workshop fraud risk management & audit investigasi fraud

Uraian Kegiatan:

Pemahaman best practice teori fraud, Fraud risk management (FRM), fraud di perbankan (tindak pidana perbankan), Risiko fraud pada frontliner dan back office, peran manajemen dalam mitigasi fraud, Pelaksanaan audit investigasi indikasi fraud, Menggali bukti & analisis temuan audit investigasi fraud, menyusun kertas kerja dan Menyusun laporan hasil audit investigasi fraud.

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang efektif dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi individu dan organisasi. Dengan pemahaman yang baik dan keterampilan yang memadai, individu dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

B.2.

Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah. Pengawasan dilakukan secara aktif dengan mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan secara berkala antara lain melalui pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris; memberikan saran dan arahan kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan fungsi kepatuhan.

Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

1. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan:

Agar menjadi perhatian atas hasil evaluasi dan pemantauan terhadap Laporan Internal Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berkaitan dengan Program Kerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) di mana kemajuan (progress) masih belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pelaksanaannya di Triwulan I 2025 yaitu melakukan sosialisasi dan monitor tindak lanjut program RAKB.

Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

Pelaksanaan Program Kerja yang tertuang di RAKB yaitu pelaksanaan Sosialisasi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2025.

2. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan:

Dewan Komisaris melakukan analisis untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, baik dari segi tujuan, target, maupun strategi yang ditetapkan. Serta Mengamati laporan keuangan setiap bulan selanjutnya melakukan pengawasan, memberikan nasehat atau masukan secara berkala pada Direksi.

Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

Dengan langkah-langkah pengawasan yang komprehensif ini, Dewan Komisaris berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis.

Dengan demikian, pengawasan Dewan Komisaris terhadap fungsi kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memiliki tata kelola yang baik.

B.3.

Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Tidak ada keputusan maupun aktivitas bisnis dan operasional PT BPR BERKAH (Perseroda) yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sepanjang Semester I 2025 periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

B.4.

Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas

MATRIK TINDAK LANJUT LHP OJK TAHUN 2024 PRIODE 31 OKTOBER 2023-31 OKTOBER 2024
TELAH SELESAI DITINDAKLANJUTI

Daftar Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas:

1.	Uraian Komitmen	Kesalahan Laporan SLIK Posisi Oktober 2024 sebanyak 152 debitur
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Koreksi laporan SLIK posisi Oktober 2024 dengan batas akhir 29 November 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
2.	Uraian Komitmen	Kesalahan Laporan Bulanan Posisi Oktober 2024 sebanyak 12.329 item
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Koreksi laporan bulanan pada APOLO posisi Oktober 2024 dengan batas akhir 29 November 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
3.	Uraian Komitmen	Penerapan prosedur kepatuhan dalam setiap analisa pemebrian kredit
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat Opini kepatuhan dalam setiap

		pengajuan kredit dimulai awal desember 2024, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
4.	Uraian Komitmen	Pelaksanaan Audit Internal periode 2024 (Januari-Oktober 2024)
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Menyampaikan realisasi pemeriksaan Audit Januari-Oktober 2024, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Audit
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
5.	Uraian Komitmen	Kertas Kerja Audit belum mencantumkan komitmen dan tindak lanjut Audite
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Merubah Kertas Kerja audit dengan memasukan tanggapan dan komitmen Audite, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Audit
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
6.	Uraian Komitmen	Pemberian Kredit kepada Fahrul (Sisa baki debit)
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan penagihan kepada nasabah a/ n fahrul, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31

		Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
7.	Uraian Komitmen	Informasi dalam analisa kredit modal kerja sangat dan tanpa disertai dengan bukti yang memadai
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan analisa ulang atas kredit Erim Yuhasa, Erlin dan Tanto Warsono, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
8.	Uraian Komitmen	Belum mempunyai ketentuan yang mengatur Agunan Likuid (Emas)
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat Ketentuan mengenai kredit dengan agunan Likuid (Emas), dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk & Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
9.	Uraian Komitmen	Pemberian Kredit dengan skema pembayaran poko diakhir tanpa disertai analisis penggunaan kredit
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Menyusun ketentuan internal yang mengatur bahwa skema pembayaran untuk kredit konsimtig berupa angsuran pokok dan bunga secara bulanan, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan

		pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk & Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
10.	Uraian Komitmen	Keterlambatan pembayaran angsuran Anggota Dewan atas nama Erin Febiana dan Wawan Sugiawan
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Menyampaikan laporan hasil kunjungan kepada debitur Erin Febiana dan Wawan Sugiawan, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
11.	Uraian Komitmen	Pemberian Kredit melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Menyampaikan memo diskresi pemberian kredit atas nama Iman Setiadi, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
12.	Uraian Komitmen	Pemeberian kredit kepada karyawan tang tidak melalui pola potong gaji
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Merubah skema pembayaran angsuran deng potong gaji a/n Rina Muslihah, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.

	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis & Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
13.	Uraian Komitmen	Belum melakukan penggantian PIC untuk pegawai yang menangani layanan IBC
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Menyampaikan Penggantian PIC yang menangani yang menangani layan IBC kepada BJB, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
14.	Uraian Komitmen	Kekurangan biaya pendidikan dalam rangka pengembangan kualitas SDM
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Merealisasikan kekurangan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan berlaku, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
15.	Uraian Komitmen	Kasus Fraud
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat ketentuan mengenai penggunaan layanan CMS paling sedikit mengatur mekanisme pelaksanaan & Pemeriksaan harian, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk

	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
16.	Uraian Komitmen	Kasus Fraud
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat ketentuan terkait limit an approval untuk transaksi non tunia, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
17.	Uraian Komitmen	Kasus Fraud
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Memberikan Sanksi kepada Saudara Febby berupa PHK sebagaimana diatur dalam ketentuan, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Opersional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
18.	Uraian Komitmen	Kasus Fraud
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Menyusun Action Plan pengembalian kerugian, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Audit
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
19.	Uraian Komitmen	Perubahan Nomenklatur
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan Perubahan Nomenklatur menjadi

		Bank Perekonomian Rakyat, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
20.	Uraian Komitmen	Media promosi masih mencantumkan kalusal "terdaftar dan diawasi" seharusnya "Berizin dan diawasi oleh OJK" tanpa mencantumkan logo OJK
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Merubah media promosi BPR dengan kalimat berizin dan diawasi oleh OJK tanpa logo OJK, dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
21.	Uraian Komitmen	Penerapan APU PPT
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	1. Pengawasn aktif dan evaluasi terhadap penerapan APU PPT secara berkala dari dekom dan direksi 2. Mengkinikan ketentuan APU PPT dan PPSPM sesuai POJK terkini 3. Melakukan pelatihan / sosialisasi APU PPT kepada seluruh pegawai 4. Menyusun laporan bulanan tentang penerapan APU PPT kepada Direksi 5. Audit Internal melaksanakan pemeriksaan terkait APU PPT; Dengan batas akhir 31 Desember 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Maanrisk & Operasional

	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
22.	Uraian Komitmen	Jumlah Komisaris masih 1 orang
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Mengajukan calon anggota Dewan Komisaris kepada OJK,dengan batas akhir 31 Januari 2025 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2025 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
23.	Uraian Komitmen	Lemahnya analisa kredit modal kerja
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Meningkatkan kemampuan analisa kredit, terutama kredit modal kerja dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan,dengan batas akhir 31 Januari 2025 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2025 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional dan Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
24.	Uraian Komitmen	Ruang hasanah dinilai kurang memadai
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Memindahkan / Memperbaiki tata kelola ruangan khasanah, dengan batas akhir 31 Januari 2025 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2025 serta telah dilaporkan ke OJK.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
25.	Uraian Komitmen	Kelemahan CBS dalam penetapan kualitas kredit
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK

Pelaksanaan Komitmen	Meminta perbaikan CBS kepada Vendor terkait penetapan kualitas kredit, dengan batas akhir 31 Januari 2025 dan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2025 serta telah dilaporkan ke OJK.
Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai

Dengan demikian kami sampaikan matrik tindak lanjut LHP OJK Tahun 2024 Periode 31 Oktober 2023 Sampai 31 Oktober 2024 yang sudah ditindak lanjuti sesuai dengan pemeriksaan. akan di ubah dan diperbaiki apaabila terdapat kekeliruan.

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI
YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi
yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
PT. BPR BERKAH (Perseroda) Semester 1 Tahun 2025**

Telah disusun mengacu pada ketentuan SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Pandeglang, 18 Juli 2025

PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Disiapkan Oleh



KIKI DIKDUL HUDAS.E

Direktur Kepatuhan

LAPORAN POKOK POKOK DAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT INTERNAL SEMESTER I 2025



PT. BPR BERKAH (Perseroda) KABUPATEN PANDEGLANG
JL. MAYOR WIDAGDO KABAYAN - PANDEGLANG (42212)
TELP FAX : 0253 5550095
WEBSITE : www.bprberkah.com
E-mail : bankberkah

Pandeglang, 24 Juli 2025

Nomor : 40 /PT.BPR.BRH/VII/2025
Lampiran : Satu (1) Berkas

Perihal : LAPORAN POKOK-POKOK HASIL AUDIT
INTERN PT. BPR BERKAH (Perseroda)
SEMESTER I 2025

Kepada
YTH. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kantor Perwakilan Serang
Jl. Letnan Djidun No. 35
Lontar Baru, Serang
BANTEN.
DI –
Tempat

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 pada bulan Juni 2024 yang diberlakukan pada 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, bahwa BPR Wajib menerapkan fungsi Audit Intern. dalam hal tersebut diantaranya, sesuai dengan pasal 83 ayat 2 huruf a, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 9 Tahun 2025 BPR wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern termasuk informasi audit yang bersifat rahasia. dengan ini kami sampaikan Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern sesuai yang dimaksud, periode Semester I 2025.

Demikian, laporan ini kami sampaikan agar menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Menyetujui,

Mengetahui,

 
BANK BPR BERKAH
H. JAENUDIN, SE, PT. BPR BERKAH (Perseroda) DONI HERMAWAN
Direktur Utama Komisariss Utama

Tembusan:

Yth. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Yth. Direktur Operasional dan Kepatuhan PT. BPR BERKAH (Perseroda)

**LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK HASIL AUDIT INTERNAL
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
PERIODE SEMESTER I 2025**

1. RUANG LINGKUP DAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

NO	RUANG LINGKUP	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN AUDIT	TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN AUDIT
1.	Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat PT. BPR BERKAH (Perseroda) pada Bagian Kredit antara lain : 1. Kredit Modal kerja 2. Kredit Anggota DPRD 3. Kredit Perangkat DESA 4. Rekapitulasi Kredit	1. 2025-01-23 2. 2025-04-14 3. 2025-04-21 4. 2025-04-28	1. 2025-01-30 2. 2025-04-18 3. 2025-04-21 4. 2025-04-29
2.	Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat PT. BPR BERKAH (Perseroda) pada Bagian Dana antara lain : 1. Suku Bunga Deposito <i>Special Rate</i> 2. Kesesuaian Suku Bunga pada CBS dan Bilyet Deposito 3. Stok Bilyet Deposito 4. Register Bilyet Deposito 5. Monitoring Petugas Pick up Tabungan	1. 2025-01-07 2. 2025-01-07 3. 2025-01-07 4. 2025-01-07 5. 2025-04-02	1. 2025-01-09 2. 2025-01-09 3. 2025-01-09 4. 2025-01-09 5. 2025-04-04
3.	Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat PT. BPR BERKAH (Perseroda) pada bagian Operasional antara lain : 1. Pembayaran Insentif Kredit Bermasalah 2. Pembayaran SPPD 3. Surat Perintah Pengeluaran Uang (SPPU) 4. Pembayaan Fee Nasabah Baru 5. Variansi Anggaran 6. Know Your Customer (KYC) 7. Formulir Pengkinian Data 8. Slip Setoran dan Penarikan	1. 2025-02-05 2. 2025-02-05 3. 2025-04-08 4. 2025-04-08 5. 2025-04-09 6. 2025-01-22 dan 2025-04-09 7. 2025-01-22 dan 2025-04-09 8. 2025-01-22 dan 2025-04-09	1. 2025-02-07 2. 2025-02-07 3. 2025-04-11 4. 2025-04-11 5. 2025-04-11 6. 2025-01-28 dan 2025-04-11 7. 2025-01-28 dan 2025-04-11 8. 2025-01-28 dan 2025-04-11

4.	Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat PT. BPR BERKAH (Perseroda) pada manajemen Resiko dan Kepatuhan antara Lain : 1. Strategi Anti Fraud (SAF)	1. 2025-02-14	1. 2025-02-18
5.	Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat PT. BPR BERKAH (Perseroda) pada Teknologi Informasi antara lain : 1. Tata Letak Server 2. Ketersediaan alat penunjang	1. 2025-04-09 2. 2025-01-08	1. 2025-04-11 2. 2025-01-10
6.	Pemeriksaan Pada Kantor KAS Saketi meliputi : 1. Know Your Customer (KYC) 2. Formulir Pengkinian Data 3. Slip setoran dan Penarikan 4. Alat Penunjang	1. 2025-03-04 2. 2025-03-04 3. 2025-03-04 4. 2025-03-04	1. 2025-03-07 2. 2025-03-07 3. 2025-03-07 4. 2025-03-07
7.	Pemeriksaan Pada Kantor KAS Menes meliputi : 1. Know Your Customer (KYC) 2. Formulir Pengkinian Data 3. Slip setoran dan Penarikan 4. Alat Penunjang	1. 2025-03-10 2. 2025-03-10 3. 2025-03-10 4. 2025-03-10	1. 2025-03-17 2. 2025-03-17 3. 2025-03-17 4. 2025-03-17

2. TEMUAN AUDIT

NO	FAKTA YANG TERJADI	TANGGAL KEJADIAN	PENYEBAB PENYIMPANGAN	DAMPAK PENYIMPANGAN
1	Tidak ada Temuan audit Internal yang Membahayakan BPR	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

3. KESIMPULAN AUDIT DAN PERNYATAAN AUDITOR

NO	KESIMPULAN AUDIT	PERNYATAAN AUDITOR
1	Secara umum kredit telah berjalan sesuai prosedur, namun tetap harus lebih menerapkan fungsi kehati-hatian dalam menyalurkan kredit agar lebih teliti di dalam proses Realisasi pencairan kredit, dan agar sesuai dengan Ketentuan yang ada.	Berdasarkan hasil audit, terdapat beberapa yang memerlukan perbaikan dalam proses verifikasi dokumen kredit untuk memitigasi risiko ke depan, karena kredit bukan hanya pada proses persyaratan dan pencairan, melainkan monitoring hingga kredit tersebut selesai (LUNAS)

2	Secara garis besar kesesuaian suku bunga Deposito agar segera disesuaikan dengan LPS dengan perbaikan atau membuat dan memperbaharui surat pernyataan tidak dijamin oleh LPS agar tidak ditemukan kembali temuan yang sama dikemudian hari, Seharusnya tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penginputan terhadap Core Banking System (CBS) agar tidak menjadi masalah dikemudian hari dan Dalam pengadministrasian agar lebih teliti Kembali dalam memperkuat fungsi administratif dan pembinaan harus dilakukan agar dapat memaksimalkan potensi pada petugas.	Update surat pernyataan pada Deposito yang tidak sesuai dengan LPS agar disegerakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, Seharusnya agar segera memperbaiki dan memperbaharui KYC dan Profil Resiko, dengan tujuan sekaligus pengkinian Data apabila dibutuhkan dan Seharusnya Buku Tabungan itu di pegang oleh Debitur agar tidak membuka peluang kepada petugas Pickup didalam penguasaan buku serta seharusnya Buku Tabungan di Print out dan slalu diinformasikan terhadap Debitur agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
3	Secara umum kegiatan Operasional berjalan sesuai dengan prosedur, namun tetap harus memperhatikan dalam segi administrasi agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, serta meminimalisir objek temuan atas Audit eksternal. serta perlu pengawasan dan pembinaan Khusus terhadap Front Liner agar menjalankan Fungsi Kepatuhan dengan benar.	Perlu adanya peningkatan koordinasi dan efisiensi dalam kegiatan Operasional agar menjadi lebih baik lagi, serta penguatan didalam struktur organisasi agar setiap kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
4	Fungsi Kepatuhan sudah dilaksanakan, hanya perlu dilakukan monitoring lebih lanjut.	Perlu dilakukan pemantauan dan sosialisasi lanjutan agar fungsi kepatuhan berjalan dengan baik
5	Sistem Teknologi Informasi sudah sesuai dengan ketentuan, hanya saja perlu dilakukan perubahan didalam kelistrikan dan penempatan server agar meminimalisir kerusakan akibat banjir atau kebocoran pada ruangan.	Keamanan ruangan perlu menjadi prioritas utama untuk menghindari potensi kerusakan
6	Secara Umum Operasional kantor KAS Saketi berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun didalam administrasi perlu lebih dioptimalkan, serta perlu dilakukan pengawasan dan koordinasi.	Perlu adanya peningkatan koordinasi dan efisiensi dalam kegiatan Operasional agar menjadi lebih baik lagi, serta penguatan didalam struktur organisasi agar setiap kegiatan dapat dilakukan dengan baik
7	Secara Umum Operasional kantor KAS Menes berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun didalam administrasi perlu lebih dioptimalkan, serta perlu dilakukan pengawasan dan koordinasi.	Perlu adanya peningkatan koordinasi dan efisiensi dalam kegiatan Operasional agar menjadi lebih baik lagi, serta penguatan didalam struktur organisasi agar setiap kegiatan dapat dilakukan dengan baik

4. REKOMENDASI AUDITOR, TANGGAPAN AUDITEE DAN TINDAK LANJUT / REKOMENDASI AUDITEE

NO	PENYIMPANGAN	USULAN LANGKAH PERBAIKAN	TINDAK LANJUT / KOMITMEN AUDITEE	URAIAN KOMITMEN AUDITEE	BATAS WAKTU PENYELESAIAN																														
1	<p>1. Berdasarkan SK Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja No:131.1/SK.Dir/BPR.BRH/XII/2024 tentang persyaratan dan ketentuan serta prosedur pemberian Kredit. terdapat beberapa Debitur yang belum melengkapi persyaratan, antara lain:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKNING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>101-001-000038660</td> <td>H. Heri Suheli</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>101-001-000038693</td> <td>Iroh Rohayati</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>101-001-000038631</td> <td>Epi Rianti</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>101-001-000036541</td> <td>Sumiati</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>101-001-000035518</td> <td>Kenni Amelia</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Berdasarkan SK Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit kepada Anggota DPRD No:121/SK.Dir/BPR.BRH/XII/2023 tentang persyaratan dan ketentuan serta prosedur pemberian Kredit. terdapat beberapa Debitur yang belum melengkapi persyaratan, antara lain:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>102-001-000039038</td> <td>Rifki Rafsanjani</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>102-001-000039393</td> <td>Lia Susanti</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>102-001-000039259</td> <td>Eri yanto</td> </tr> </tbody> </table>	NO	REKNING	NAMA	1	101-001-000038660	H. Heri Suheli	2	101-001-000038693	Iroh Rohayati	3	101-001-000038631	Epi Rianti	4	101-001-000036541	Sumiati	5	101-001-000035518	Kenni Amelia	NO	REKENING	NAMA	1	102-001-000039038	Rifki Rafsanjani	2	102-001-000039393	Lia Susanti	3	102-001-000039259	Eri yanto	<p>1. SOP tentang Kredit Modal Kerja sudah tersedia, hanya tinggal mengimplementasikan saja, dan agar lebih teliti kembali didalam pengecekan dokumen dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.</p> <p>2. SOP tentang pemberian Kredit kepada Anggota DPRD sudah tersedia, hanya tinggal mengimplementasikan saja, dan agar lebih teliti kembali didalam pengecekan dokumen dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. SOP tentang Pemberian Kredit pada Perangkat Desa sudah tersedia, hanya tinggal mengimplementasikan saja, dan agar lebih teliti</p>	<p>Bagian Kredit sependapat dengan usulan Auditor</p>	<p>Sebagian besar sudah dipenuhi dan akan dilakukan perbaikan dan pemenuhan atas hasil temuan audit</p>	<p>1. 2025-02-13</p> <p>2. 2025-04-29</p>
NO	REKNING	NAMA																																	
1	101-001-000038660	H. Heri Suheli																																	
2	101-001-000038693	Iroh Rohayati																																	
3	101-001-000038631	Epi Rianti																																	
4	101-001-000036541	Sumiati																																	
5	101-001-000035518	Kenni Amelia																																	
NO	REKENING	NAMA																																	
1	102-001-000039038	Rifki Rafsanjani																																	
2	102-001-000039393	Lia Susanti																																	
3	102-001-000039259	Eri yanto																																	

	<p>3. Berdasarkan SK Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit kepada Perangkat Desa No:132/SK.Dir/BPR.BRH/XII/2024 tentang persyaratan dan ketentuan serta prosedur pemberian Kredit. terdapat beberapa Debitur yang belum melengkapi persyaratan, antara lain:</p> <table border="1" data-bbox="369 443 1048 612"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>102-001-000039338</td> <td>TB. Dedi Jumhadi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>102-001-000039406</td> <td>Neng Rosidah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>102-001-000038873</td> <td>Heri Suheli</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Pada Pencatatan Rekapitulasi Kredit terdapat kesalahan pada nominatif Kredit Berdasarkan POS Pelayanan. yang seharusnya pada rekapitulasi Pos Pelayanan hanya 6 (enam) POS pelayanan saja, namun yang terjadi ada 7 (Tujuh) Pos yaitu LOKET DANA, yang seharusnya tidak ada</p>	NO	REKENING	NAMA	1	102-001-000039338	TB. Dedi Jumhadi	2	102-001-000039406	Neng Rosidah	3	102-001-000038873	Heri Suheli	<p>kembali didalam pengecekan dokumen dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.</p> <p>4. Nominatif per POS Pelayanan agar langsung dikoordinasikan dengan bagian terkait agar dapat dilakukan perubahan, untuk AO Kredit agar lebih teliti Kembali dalam melakukan Registrasi Kredit untuk meminimalisir kesalahan pada Pencatatan.</p>			<p>3. 2025-05-09</p> <p>4. 2025-04-30</p>
NO	REKENING	NAMA															
1	102-001-000039338	TB. Dedi Jumhadi															
2	102-001-000039406	Neng Rosidah															
3	102-001-000038873	Heri Suheli															
2	<p>1. Terdapat Suku Bunga Deposito <i>Special Rate</i> diatas LPS antara lain :</p> <table border="1" data-bbox="369 906 1048 1034"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>44908</td> <td>Hendra Indra Rachman</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2200591</td> <td>PT. Jamkrida Banten</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Terdapat Ketidaksesuaian Suku Bunga Deposito antara pencatatan pada Core banking System (CBS) dengan catatan pada Bilyet a.n PT. Jamkrida Banten (2200591) (496).</p> <p>3. Register Bilyet Deposito masih ada yang terlewat secara nomor urut karena beberapa masih ada yang gagal dalam Registrasi</p>	NO	REKENING	NAMA	1	44908	Hendra Indra Rachman	2	2200591	PT. Jamkrida Banten	<p>1. agar dilakukan Update surat Pernyataan tidak dijamin oleh LPS</p> <p>2. agar segera dilakukan Perubahan pada CBS</p> <p>3. Seharusnya dilakukan Evaluasi Kembali agar tidak terjadi hal serupa</p> <p>4. Seharusnya dilakukan pemantauan dan Evaluasi agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari</p>	Bagian DANA sependapat dengan usulan Auditor	Akan segera dilakukan perbaikan dan pemenuhan atas hasil temuan audit	<p>1. 2025-01-17</p> <p>2. 2025-01-30</p> <p>3. 2025-01-30</p>			
NO	REKENING	NAMA															
1	44908	Hendra Indra Rachman															
2	2200591	PT. Jamkrida Banten															

	4. didalam Monitoring Debitur Tabungan, masih terdapat buku tabungan yang dipegang oleh petugas Pick up dalam waktu yang cukup lama.				4. 2025-01-30
3	<p>1. Pembayaran Insentif Kredit Bermasalah</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Tidak ditemukannya bukti pembayaran nasabah didalam permohonan ✚ Ketidaksesuaian dengan SK karna status (Kurang Lancar) ✚ Kesalahan Penulisan dalam Kuitansi Fee <p>2. Pemberian SPPD</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Tidak ada Laporan hasil Bukti Kunjungan dan tidak di upload dokumentasi ✚ Tidak ada tanda tangan pejabat pemberi tugas dalam SPPD No:0032/ST/BPR-BRH/I/2025 ✚ Tidak ada tanda tangan dua orang pengikut dalam SPPD No:0026/ST/BPR-BRH/2025. <p>3. Surat Perintah Pengeluaran Uang (SPPU)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pada Tanggal 13 Maret 2025 pada SPPU No 503 Tidak Ada Tanda Terima dan TTD ✚ Pada Tanggal 13 Maret 2025 pada SPPU No 521 Tidak ada Tanggal, Tanda terima dan Tanda Tangan ✚ Pada Tanggal 13 Maret 2025 pada SPPU No 578 Tidak Ada Tanda Terima dan Tanda tangan <p>4. Pembayaan Fee Nasabah Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Tidak ada tanda tangan calon debitur a.n Wahyu Tirtana yang diajukan oleh Virgianti Dwi Fadillah ✚ Dasar SK NO:54/SK.Dir/PT.BPR-BRH/III/2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seharusnya diperiksa Kembali dalam Log CBS terkait pengajuan FEE 2. Seharusnya diperiksa Kembali didalam Aplikasi SPPD guna memvalidasi Laporan Hasil Kunjungan 3. Seharusnya agar lebih teliti Kembali didalam SPPU 4. Seharusnya agar lebih teliti Kembali didalam pengadministrasian pembayaran Fee nasabah 5. Variansi Anggaran seharusnya diisi agar dapat mengevaluasi secara rutin tentang pencapaian dari RBB 6. Harus Lebih teliti didalam pengisian KYC agar mengetahui profil dan Data Debitur untuk di jadikan dasar analisa 7. Harus lebih teliti didalam wawancara dan pengisian 	Bagian Operasional Sependapat dengan usulan Auditor	Sebagian besar sudah dipenuhi dan akan dilakukan perbaikan dan pemenuhan atas hasil temuan audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025-02-28 2. 2025-02-28 3. 2025-02-28 4. 2025-02-28

<p>5. Variansi Anggaran Didalam Neraca masih terdapat kekosongan dari Januari sampai dengan Maret 2025 yang seharusnya diisi sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) agar memudahkan dalam mengevaluasi kinerja keuangan</p> <p>6. Know Your Customer (KYC) Terdapat pada KYC yang belum dilengkapi seperti Nomor telpon, Nama Ibu Kandung, No Bukti Identitas, tempat tanggal lahir dan Pekerjaan Seperti:</p> <table border="1" data-bbox="369 566 1048 737"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>203-001-000043604</td> <td>Yulia Fajriani</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>202-001-000043352</td> <td>Raminudin</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>203-001-000043606</td> <td>Yanti Sukmawati</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Formulir Pengkinian Data Terdapat pada Formulir Pengkinian data yang belum dilengkapi seperti, ID Nasabah, Nomor KTP, Tujuan Penggunaan, masa berlaku dan penghasilan Nasabah seperti :</p> <table border="1" data-bbox="369 944 1048 1115"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>202-001-000022329</td> <td>lim Suganda</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>206-001-000040090</td> <td>lim Suganda</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>201-001-000043619</td> <td>TB AZIZ ALAWI OZI</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. Slip Setoran dan Penarikan ✚ Terdapat pengisian slip setoran yang belum dilengkapi seperti Alamat, Nomor telpon, Tujuan Penggunaan, Sumber Dana, Berita/Informasi dan Tanda Tangan Nasabah.</p>	NO	REKENING	NAMA	1	203-001-000043604	Yulia Fajriani	2	202-001-000043352	Raminudin	3	203-001-000043606	Yanti Sukmawati	NO	REKENING	NAMA	1	202-001-000022329	lim Suganda	2	206-001-000040090	lim Suganda	3	201-001-000043619	TB AZIZ ALAWI OZI	<p>Formulir Pengkinian data agar sesuai.</p> <p>8. Pastikan agar didalam slip penarikan dan Slip setoran diisi dan diteliti Kembali agar sesuai dengan data yang ada dalam daftar isian</p>			<p>5. 2025-02-28 dan 2025-04-30</p> <p>6. 2025-02-28 dan 2025-04-30</p> <p>7. 2025-02-28 dan 2025-04-30</p> <p>8. 2025-02-28 dan 2025-04-30</p>
NO	REKENING	NAMA																										
1	203-001-000043604	Yulia Fajriani																										
2	202-001-000043352	Raminudin																										
3	203-001-000043606	Yanti Sukmawati																										
NO	REKENING	NAMA																										
1	202-001-000022329	lim Suganda																										
2	206-001-000040090	lim Suganda																										
3	201-001-000043619	TB AZIZ ALAWI OZI																										

	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Terdapat Slip setoran A.n Nina Khaerani (13199) tanpa ada bukti Validasi, namun didalam slip tersebut dituliskan sudah Validasi secara manual. ✚ Terdapat pengisian slip Penarikan yang belum dilengkapi seperti Nomor telpon, Sumber dana dan Berita/Informasi. ✚ Terdapat Perbedaan warna tinta, yang membuktikan bahwa perbedaan tinta tersebut karena di lengkapi oleh bagian Teller 				
4	<p>Sosialisasi dan Monitoring Manajemen Resiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bagian Manajemen Resiko dan Kepatuhan belum melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh terhadap beberapa kantor KAS. 	Seharusnya disegerakan agar pemahaman kepatuhan dan penerapannya bisa berjalan dengan baik	Bagian Manajemen resiko dan Kepatuhan Sependapat	Akan segera dilakukan sosialisasi pada Semester II.	2025-08-10
5	<p>Pada Bagian Teknologi Informasi (TI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Didalam Posisi server dan kelistrikan berada di lantai kondisi ini merupakan kondisi yang kurang aman apabila terjadi banjir atau kebocoran Gedung yang bisa menyebabkan Konsleting pada Kelistrikan. 2. Ditemukan beberapa ruangan yang tidak memiliki Apar pada ruang vital dalam kegiatan operasional BPR untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seharusnya dilakukan Koordinasi dengan atasan terkait posisi karena khawatir ada kebocoran pada ruangan, banjir dan lain lain. 2. Seharusnya ketersediaan Apar berada pada ruangan tertentu 	Bagian TI Sependapat dengan Audit	Sudah ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025-03-31 2. 2025-05-30
6	<p>Pada Pemeriksaan Kantor KAS Saketi terdapat beberapa temuan administratif seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Know Your Customer (KYC) <p>Terdapat pada KYC yang belum dilengkapi seperti Nomor telpon, Nama Ibu Kandung, Pendidikan Terakhir, Data Pekerjaan, dan Sumber dana:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus Lebih teliti didalam pengisian KYC agar mengetahui profil dan Data Debitur untuk di jadikan dasar analisa 	Kepala Kantor KAS Saketi Sependapat dengan Audit	Sebagian besar sudah dipenuhi dan akan dilakukan perbaikan dan pemenuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025-03-14

	<table border="1" data-bbox="369 194 1048 322"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>202-001-000025074</td> <td>Jumanta</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>201-001-000035327</td> <td>Ahmad Yani</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Formulir Pengkinian Data Terdapat pada Formulir Pengkinian data yang belum dilengkapi seperti, ID Nasabah, Nomor KTP, Tujuan Penggunaan, masa berlaku dan penghasilan Nasabah seperti a.n Mira Nuroctaviana (201-001-000023170)</p> <p>3. Slip setoran dan Penarikan Terdapat pada Slip Setoran dan Penarikan yang belum dilengkapi seperti Alamat, Telp dan Berita / Informasi Seperti : Slip Setoran :</p> <table border="1" data-bbox="369 737 1048 865"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>201-001-000018849</td> <td>Siti Aminah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>203-001-000025196</td> <td>Diana Sari</td> </tr> </tbody> </table> <p>Slip Penarikan</p> <table border="1" data-bbox="369 906 1048 1034"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>201-001-000040429</td> <td>Siti Saodah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>202-001-000002102</td> <td>Encep Ahmad Supyani</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Alat Penunjang yang seharusnya berjalan dengan lancar yaitu CCTV.</p>	NO	REKENING	NAMA	1	202-001-000025074	Jumanta	2	201-001-000035327	Ahmad Yani	NO	REKENING	NAMA	1	201-001-000018849	Siti Aminah	2	203-001-000025196	Diana Sari	NO	REKENING	NAMA	1	201-001-000040429	Siti Saodah	2	202-001-000002102	Encep Ahmad Supyani	<p>2. Harus lebih teliti didalam wawancara dan pengisian Formulir Pengkinian data agar sesuai.</p> <p>3. Pastikan agar didalam slip penarikan dan Slip setoran diisi dan diteliti Kembali agar sesuai dengan data yang ada dalam daftar isian</p> <p>4. Seharusnya CCTV diperbaiki untuk mitigasi resiko dikemudian hari</p>		<p>atas hasil temuan audit</p>	<p>2. 2025-03-14</p> <p>3. 2025-03-14</p> <p>4. 2025-03-14</p>
NO	REKENING	NAMA																														
1	202-001-000025074	Jumanta																														
2	201-001-000035327	Ahmad Yani																														
NO	REKENING	NAMA																														
1	201-001-000018849	Siti Aminah																														
2	203-001-000025196	Diana Sari																														
NO	REKENING	NAMA																														
1	201-001-000040429	Siti Saodah																														
2	202-001-000002102	Encep Ahmad Supyani																														
<p>7</p>	<p>Pada Pemeriksaan Kantor KAS Menes terdapat beberapa temuan administratif seperti :</p> <p>1. Know Your Customer (KYC) Terdapat pada KYC yang belum dilengkapi seperti Nomor telpon, Nama Ibu Kandung, Pendidikan Terakhir, Data Pekerjaan, dan Sumber dana:</p>	<p>1. Harus Lebih teliti didalam pengisian KYC agar mengetahui profil dan Data Debitur untuk di jadikan dasar analisa</p>	<p>Kepala Kantor KAS Menes Sependapat dengan Audit</p>	<p>Sebagian besar sudah dipenuhi dan akan dilakukan perbaikan dan pemenuhan</p>	<p>1. 2025-03-31</p>																											

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>201-001-000041201</td> <td>Maman Sumantri</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>201-001-000041251</td> <td>Piyah</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Formulir Pengkinian Data Terdapat pada Formulir Pengkinian data yang belum dilengkapi seperti, ID Nasabah, Tujuan Penggunaan, Rekening, masa berlaku dan penghasilan Nasabah seperti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>201-001-000020640</td> <td>Aminudin</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>201-001-000004327</td> <td>Nurhasanah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>201-001-000033513</td> <td>Ita Juwita</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Slip setoran dan Penarikan Terdapat pada Slip Setoran dan Penarikan yang belum dilengkapi seperti, Telp, Tujuan Penggunaan, Sumber Dana dan Berita / Informasi Seperti : Slip Setoran</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>203-001-000037751</td> <td>Setiawati</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>201-001-000011671</td> <td>E. Deby Triani</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>201-001-000010295</td> <td>Deni Haryadi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Slip Penarikan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>202-001-000028883</td> <td>Encep Saepudin</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>201-001-000019204</td> <td>Maman</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>201-001-000040763</td> <td>Dwi Nuriska</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Alat Penunjang yang seharusnya berjalan dengan lancar yaitu CCTV.</p>	NO	REKENING	NAMA	1	201-001-000041201	Maman Sumantri	2	201-001-000041251	Piyah	NO	REKENING	NAMA	1	201-001-000020640	Aminudin	2	201-001-000004327	Nurhasanah	3	201-001-000033513	Ita Juwita	NO	REKENING	NAMA	1	203-001-000037751	Setiawati	2	201-001-000011671	E. Deby Triani	3	201-001-000010295	Deni Haryadi	NO	REKENING	NAMA	1	202-001-000028883	Encep Saepudin	2	201-001-000019204	Maman	3	201-001-000040763	Dwi Nuriska	<p>2. Harus lebih teliti didalam wawancara dan pengisian Formulir Pengkinian data agar sesuai.</p> <p>3. Pastikan agar didalam slip penarikan dan Slip setoran diisi dan diteliti Kembali agar sesuai dengan data yang ada dalam daftar isian</p> <p>4. Seharusnya CCTV diperbaiki untuk mitigasi resiko dikemudian hari</p>		<p>atas hasil temuan audit</p>	<p>2. 2025-03-31</p> <p>3. 2025-03-31</p> <p>4. 2025-03-31</p>
NO	REKENING	NAMA																																																
1	201-001-000041201	Maman Sumantri																																																
2	201-001-000041251	Piyah																																																
NO	REKENING	NAMA																																																
1	201-001-000020640	Aminudin																																																
2	201-001-000004327	Nurhasanah																																																
3	201-001-000033513	Ita Juwita																																																
NO	REKENING	NAMA																																																
1	203-001-000037751	Setiawati																																																
2	201-001-000011671	E. Deby Triani																																																
3	201-001-000010295	Deni Haryadi																																																
NO	REKENING	NAMA																																																
1	202-001-000028883	Encep Saepudin																																																
2	201-001-000019204	Maman																																																
3	201-001-000040763	Dwi Nuriska																																																

5. HASIL PEMANTAUAN KOMITMEN AUDIT

NO	REALISASI KOMITMEN AUDITEE	HASIL PEMANTAUAN KOMITMEN	STATUS REALISASI
1	1. Kredit Modal kerja sudah ditindak lanjuti 2. Kredit Anggota DPRD sudah ditindaklanjuti 3. Kredit Perangkat DESA sudah ditindaklanjuti 4. Rekapitulasi Kredit sudah ditindaklanjuti	1. Sudah dilengkapi 2. Sudah dilengkapi 3. Sudah dilengkapi 4. Sudah disesuaikan dengan Pos masing masing	1. 01 2. 01 3. 01 4. 01
2	1. Suku Bunga Deposito <i>Special Rate</i> sudah ditindaklanjuti 2. Kesesuaian Suku Bunga Deposito sudah ditindaklanjuti 3. Stok Bilyet Deposito sudah ditindaklanjuti 4. Register Bilyet Deposito sudah ditindaklanjuti 5. Monitoring Petugas Pick up Tabungan akan ditindaklanjuti	1. Sudah Disesuaikan 2. Sudah Disesuaikan 3. Sudah Direalisasikan 4. Sudah Dilakukan Perbaikan 5. Masih Dalam proses monitoring	1. 01 2. 01 3. 01 4. 01 5. 02
3	1. Pembayaran Insentif Kredit Bermasalah Sudah ditindaklanjuti 2. Pemberian SPPD sudah ditindaklanjuti 3. Surat Perintah Pengeluaran Uang (SPPU) sudah ditindaklanjuti 4. Pembayaran Fee Nasabah Baru sudah ditindaklanjuti 5. Variansi Anggaran belum ditindaklanjuti 6. Know Your Customer (KYC) sudah dilengkapi dan ditindaklanjuti 7. Formulir Pengkinian Data sudah dilengkapi dan ditindaklanjuti 8. Slip Setoran dan Penarikan sudah dilengkapi dan ditindaklanjuti	1. Sudah dilengkapi 2. Sudah dilengkapi 3. Sudah dilengkapi 4. Sudah dilengkapi 5. Belum dilakukan penyesuaian 6. Sudah dilengkapi 7. Sudah dilengkapi 8. Sudah dilengkapi	1. 01 2. 01 3. 01 4. 01 5. 03 6. 01 7. 01 8. 01
4	Akan ditindaklanjuti semester depan sesuai dengan jadwal yang direncanakan	Akan dilakukan sosialisasi	02
5	1. Sudah dikoordinasikan 2. Akan dilakukan Pengadaan	1. Sudah dipenuhi 2. Sudah dipenuhi	1. 01 2. 01

6	<p>Kantor KAS Saketi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KYC (Know Your Customer) Sudah di tindaklanjuti. 2. Form Pengkinian Data Sudah ditindaklanjuti 3. Slip Setoran dan Penarikan Sudah ditindaklanjuti 4. CCTV belum ditindak lanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilengkapi 2. Sudah dilengkapi 3. Sudah dilengkapi 4. Saran dari Auditor agar membuat permohonan ke Kantor Pusat terkait perbaikan CCTV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01 2. 01 3. 01 4. 03
7	<p>Kantor KAS Menes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KYC (Know Your Customer) Sudah di tindaklanjuti. 2. Form Pengkinian Data Sudah ditindaklanjuti 3. Slip Setoran dan Penarikan Sudah ditindaklanjuti 4. CCTV belum ditindak lanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilengkapi 2. Sudah dilengkapi 3. Sudah dilengkapi 4. Saran dari Auditor agar membuat permohonan ke Kantor Pusat terkait perbaikan CCTV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01 2. 01 3. 01 4. 03

Pandeglang, 24 Juli 2025
PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Auditor

Menyetujui,

Mengetahui,



IRHAM BAGUS DARMAWAN
AUDITOR




IWAN KURNIAWAN
PE. AUDIT INTERNAL



H. JAENUDIN, SE
DIREKTUR UTAMA



DRS. DONI HERMAWAN
KOMISARIS UTAMA



HJ. NURIAH, SKM, M.SI
ANGGOTA KOMISARIS

**LAPORAN POKOK - POKOK HASIL AUDIT INTERNAL
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
PERIODE PEMERIKSAAN SEMESTER I 2025**

PERNYATAAN AUDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : IWAN KURNIAWAN
JABATAN : PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERNAL
NIP : 19740801200712

Menyatakan bahwa pelaksanaan Audit Internal :

- Audit dalam melaksanakan tugasnya paling tidak dilakukan sesuai jadwal atau perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Serta disusun tiap tahun sebagai bagian bentuk dari program Audit Internal tahunan PT. BPR BERKAH (Perseroda)
- Audit dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan kondisi usaha serta pada tahapan tahapan nya sesuai dengan pedoman standar pelaksanaan fungsi Audit Internal
- Sifat kegiatan Audit Internal selain Independent dalam melakukan penilaian terhadap kinerja masing masing bagian unit atau bagian organisasi juga memberikan konsultasi agar tercapainya tata kelola perusahaan yang baik
- Prinsip pelaksanaan Audit Internal dilakukan secara Akuntabilitas, Objektivitas, Independensi dan Resposibilitas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

**Audit Internal
PT. BPR BERKAH (Perseroda)**



IWAN KURNIAWAN
PE Audit Internal

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Posisi : Semester 1 Tahun 2025

Faktor / Komponen	Penilaian Posisi Laporan Semester 1 Tahun 2025				Penilaian Posisi Sebelumnya Semester 2 Tahun 2024				
	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)	
Profil Risiko		2	25%	0.5		2	25%	0.5	
Tata Kelola		2	30%	0.6		2	30%	0.6	
Rentabilitas		4	15%	0.6		3	15%	0.45	
1. Return on Asset (ROA)	1.08%	3			1.58%	2			
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	100.9%	5			91.06%	3			
3. Net Interest Margin (NIM)	5.11%	4			7.58%	3			
Permodalan		3	30%	0.9		3	30%	0.9	
1. Rasio KPMM	24.82%	1			27.18%	1			
2. Rasio MIAPB	147.52%	4			149.22%	4			
Nilai Komposit				2.60	Nilai Komposit				2.45
Peringkat Komposit				2 (Sehat)	Peringkat Komposit				2 (Sehat)

Analisis Posisi Laporan

1. Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi PT. BPR Berkah secara umum cukup sehat. Penilaian ini didasarkan pada beberapa faktor kunci seperti profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan.

Profil Risiko:

Dikatakan bahwa profil risiko PT. BPR Berkah dinilai rendah. Ini menunjukkan bahwa manajemen PT. BPR Berkah memiliki kebijakan yang efektif dalam mengelola risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga tersebut. Hal ini bisa mencakup manajemen risiko kredit, likuiditas, dan risiko lainnya.

Penerapan Tata Kelola:

Penerapan tata kelola di PT. BPR Berkah dinilai sangat baik. Tata kelola yang baik menunjukkan bahwa lembaga memiliki struktur organisasi yang efisien, proses pengambilan keputusan yang jelas, dan sistem pengawasan yang kuat. Ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional BPR.

Rentabilitas:

Rentabilitas PT. BPR Berkah secara umum dianggap sehat. Rentabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba yang memadai dari kegiatan operasionalnya. Ini

dapat menjadi indikator keberlanjutan dan daya saing BPR di pasar.

Permodalan:

Tingkat permodalan PT. BPR Berkah dinilai cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa BPR memiliki cukup modal untuk menutupi risiko- risiko yang mungkin timbul, serta memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas.

Kelemahan Tidak Signifikan:

Meskipun diakui bahwa mungkin ada kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal, namun dianggap bahwa kelemahan tersebut tidak signifikan secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa PT. BPR Berkah mampu mengelola dan memitigasi kelemahan- kelemahan yang ada tanpa mempengaruhi secara substansial kesehatan keseluruhan lembaga.

Dengan demikian, PT. BPR Berkah tampaknya mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Keberhasilan BPR dalam beberapa aspek kunci ini memperkuat keyakinan bahwa lembaga tersebut berada dalam kondisi finansial dan operasional yang kuat. Tetapi, perlu diingat bahwa analisis lebih lanjut dan pemantauan terus-menerus tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan BPR mengingat dinamika pasar yang selalu berubah.

2. Profil Risiko

Profil Risiko BPR termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
2. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

3. Tata Kelola

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

4. Rentabilitas

Dengan demikian, PT. BPR Berkah secara keseluruhan tampaknya berada dalam kondisi yang sehat dan memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Kombinasi rentabilitas yang baik, dukungan permodalan, dan fokus pada core earnings menandakan manajemen yang efektif dan strategi bisnis yang berhasil.

5. Permodalan

Secara keseluruhan, PT.BPR BERKAH dengan peringkat 3 ini dapat dianggap sebagai institusi keuangan yang cukup baik, dengan fondasi permodalan yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan dukungan yang memadai untuk pertumbuhan bisnis ke depan. Keseluruhan kondisi ini menciptakan kepercayaan baik dari regulator, pemegang saham, dan pelanggan.

Pandeglang, 18 Juli 2025
PT. BPR BERKAH (Perseroda)



KIKI DIKDUL HUDA, S.E
DIREKTUR OPERSIONAL DAN KEPATUHAN

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)



H. JAENUDIN, S.E
DIREKTUR UTAMA



H.J. NURIAH, SKM, M.SI.
ANGGOTA KOMISARIS

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)

DEWAN KOMISARIS Drs. DONI HERMAWAN
KOMISARIS UTAMA

Lampiran Kertas Kerja Penilaian Tingkat Kesehatan

No	Faktor / Parameter	Nominal	Peringkat	Analisis
1	Profil Risiko		2 (Rendah)	Profil Risiko BPR termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: 1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. 2. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
2	Tata Kelola (GCG)		2 (Baik)	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
3	Rentabilitas		4 (Kurang Baik)	Dengan demikian, PT. BPR Berkah secara keseluruhan tampaknya berada dalam kondisi yang sehat dan memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Kombinasi rentabilitas yang baik, dukungan permodalan, dan fokus pada core earnings menandakan manajemen yang efektif dan strategi bisnis yang berhasil.
	A. ROA			
	Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	Rp2.642.923.246	3	$1.5\% > ROA \geq 1\%$ (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 3)
	Rata-rata Aset	Rp264.582.841.406		
	Hasil	1%		
	B. Ratio BOPO			
	Beban Operasional	Rp39.879.080.739	5	$BOPO > 100\%$ (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 5)
	Pendapatan	Rp39.309.450.632		

	Operasional			
	Hasil	101.45%		
	C. NIM			
	Pendapatan Bunga Bersih	Rp13.413.332.420	4	6 % > NIM ≥ 4 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 4)
	Rata-Rata Aset Produktif	Rp262.494.867.921		
	Hasil	5.11%		
4	Faktor Permodalan		3 (Cukup Baik)	Secara keseluruhan, PT.BPR BERKAH dengan peringkat 2 ini dapat dianggap sebagai institusi keuangan yang cukup baik, dengan fondasi permodalan yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan dukungan yang memadai untuk pertumbuhan bisnis ke depan. Keseluruhan kondisi ini menciptakan kepercayaan baik dari regulator, pemegang saham, dan pelanggan.
	A. Ratio KPMM			
	Modal	Rp18.857.480.790	1	KPMM ≥ 15 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 1)
	ATMR	Rp75.977.078.270		
	Hasil	24.82%		
	B. Rasio MIAPB (Modal Inti / APB)			
	Modal Inti	Rp17.906.109.053	4	150 % > MIAPB ≥ 120 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 4)
	Aset Produktif Bermasalah	Rp12.138.743.296		
	Hasil	147.51%		

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penilaian Sendiri
Tingkat Kesehatan PT. BPR BERKAH (Perseroda)
Semester I Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan Ketentuan yang mengatur sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/ POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022.
- 2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/ SEOK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 18 Juli 2022.

Pandeglang, 18 Juli 2025

PT. BPR BERKAH (Perseroda)



KIKI DIKDUL HUDA,S.E
DIREKTUR OPERSIONAL DAN KEPATUHAN

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)

H. JAENUDIN,S.E
DIREKTUR UTAMA



HJ. NURIAH,SKM,M.SI.
ANGGOTA KOMISARIS

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
DEWAN KOMISARIS

Drs.DONI HERMAWAN
KOMISARIS UTAMA

Form 0000

Laporan Profil Risiko

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)
Sandi BPR : 010201-600613
Periode : 30 Juni 2025
Nomor Telepon : 0
Alamat : Jl. Mayor Widagdo, Desa Kabayan

Modal Inti : 17906109053
Total Aset : 256269048092
Jumlah Kantor Cabang : 0
Kegiatan sebagai Penerbit
Kartu ATM atau Kartu Debit : Ya

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	2	2	2	2	2
Risiko Operasional	2	2	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	2	2
Risiko Likuiditas	3	1	2	3	1	2
Risiko Reputasi	0	0	0			
Risiko Stratejik	0	0	0			
Peringkat Risiko			2			2

Analisis

Profil Risiko BPR termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik. antara lain sebagai berikut:. 1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan. kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong. sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.. 2. Rata-rata tingkat KPMR sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor,. kelemahan tersebut dapat diabaikan.

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1100	2	Peringkat 2, Rendah
Tingkat Risiko Inheren	1200	2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain: a. portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah; b. eksposur pemberian kredit terdiversifikasi baik; c. pemberian kredit memiliki kualitas yang baik; d. strategi pemberian kredit tergolong relatif stabil; dan e. portofolio pemberian kredit kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Tingkat KPMR	1300	2	KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 9. Proses penyediaan dana secara umum memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses kredit berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit	1210		2	Penilaian pada pilar Risiko Inheren [Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit] berada pada peringkat 2 (Rendah).
Rasio aset produktif terhadap total aset	1211	90,80	2	untuk parameter rasio aset produktif terhadap total aset memiliki resiko yang sedang
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	1212	99,80	2	Berikut adalah penjelasan parameter risiko yang dinilai BPR dalam beberapa kalimat... Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif BPR mencapai 90,9 persen, yang merupakan tingkat risiko rendah (peringkat 2). Dengan rasio di atas 75 persen, sebagian besar atau seluruh skema kredit yang ditawarkan sederhana, dan jenis kredit yang ditawarkan tidak beragam.
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	1213	6,40	1	BPR menilai parameter risiko dengan mempertimbangkan rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan, yang mencapai 6,3 persen. Peringkat risiko ini adalah 1 (Sangat Rendah), yang berarti konsentrasi kredit pada 25 debitur terbesar masih sangat rendah dan berada di bawah ambang batas 20 persen.
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	1214	97,60	2	BPR memiliki rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan sebesar 97,7 persen, yang termasuk dalam kategori risiko rendah (peringkat 2). Ini berarti lebih dari 85 persen kredit berasal dari tiga sektor ekonomi terbesar, dan komposisi ini relatif tidak berubah dalam jangka waktu yang lama.
Kualitas aset	1220		2	Penilaian pada pilar Risiko Inheren [Kualitas aset] berada pada peringkat 2 (Rendah).
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1221	7,48	2	Berikut adalah rangkuman informasinya dalam 2-3 kalimat... BPR memiliki rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif sebesar 8.5 persen, yang dinilai dengan peringkat 2 (Rendah). Kondisi ini menunjukkan kualitas kredit yang baik, ditandai dengan jumlah kredit restrukturisasi, penurunan kualitas kredit, dan kredit menunggak yang tidak signifikan. Selain itu, sektor ekonomi berisiko tinggi tidak memberikan dampak signifikan, dan mayoritas aset bermasalah adalah penempatan pada bank lain.
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	1222	5,17	2	Rasio Kredit Bermasalah Bersih (NPL net) BPR sebesar 9,38 persen dengan peringkat 2 (Rendah) menunjukkan kualitas kredit yang baik. Hal ini tercermin dari jumlah kredit restrukturisasi yang tidak signifikan, penurunan kualitas kredit dari kategori Lancar ke Tidak Lancar yang tidak berarti, serta exposure yang kecil ke sektor berisiko tinggi dan kredit macet yang berasal dari penempatan pada bank lain.

Form 0101

Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	1223	9,27	2	BPR memiliki rasio kredit kualitas rendah (KKR) sebesar 91,8 persen terhadap total kredit yang diberikan, dengan peringkat risiko Rendah (peringkat 2). Meskipun rasionya tinggi, kondisi kredit BPR tetap baik karena kredit restrukturisasi, penurunan kualitas kredit, sektor berisiko tinggi, dan kredit menunggak tidak signifikan. Aset produktif bermasalah sebagian besar ditempatkan pada bank lain, menunjukkan pengelolaan risiko yang baik.
Strategi penyediaan dana	1230		2	Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri dan seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.
Faktor eksternal	1240		3	Terdapat perubahan faktor eksternal, namun ada sebagian terdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.
Lainnya	1299			
Tingkat Risiko Inheren Kredit	1292		2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain: a. portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah; b. eksposur pemberian kredit terdiversifikasi baik; c. pemberian kredit memiliki kualitas yang baik; d. strategi pemberian kredit tergolong relatif stabil; dan e. portofolio pemberian kredit kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	1310	2	Penilaian pada indikator Pengawasan Direksi dan Komisaris berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	1311	1	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Risiko kredit.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	1312	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	1313	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	1314	1	Memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	1315	1	Memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	1316	2	Terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	1320	2	Penilaian pada indikator Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1321	2	Telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit.
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	1322	2	Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	1323	2	Menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru dan terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan aktivitas baru dengan ketentuan.
Kecukupan Proses dan Sistem	1330	2	Penilaian pada indikator Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko berada pada peringkat 2 (Rendah).

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	1331	2	Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	1332	2	Telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	1340	2	Penilaian pada indikator Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	1341	2	Audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	1342	2	Terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang perorganisasian BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Tingkat KPMR	1350	2	KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 9. Proses penyediaan dana secara umum memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses kredit berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.

Form 0200

Analisis Risiko Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2100	2	Peringkat 2, Rendah
Tingkat Risiko Inheren	2200	2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakter antara lain: a. bisnis BPR memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dan e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah.

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat KPMR	2300	2	KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakter antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. 9. Manajemen keberlangsungan usaha (business continuity management/BCM) andal dan teruji. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.

Form 0201

Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	2210	2	Penilaian pada pilar Risiko Inheren [Kompleksitas bisnis dan kelembagaan] berada pada peringkat 2 (Rendah).
Skala usaha dan struktur organisasi	2211	3	Skala usaha BPR tergolong kecil atau menengah dan Struktur organisasi BPR terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPR.
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	2212	1	Memiliki kantor kas dan rentang kendali kecil serta lokasi kantor kas dapat di akses dengan mudah.
Keberagaman produk dan/atau jasa	2213	1	BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama.
Tindakan korporasi	2214	2	BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan serta BPR tidak dalam proses pemindahan kantor pusat BPR.
Sumber daya manusia (SDM)	2220	3	Penilaian pada pilar Risiko Inheren [Sumber daya manusia (SDM)] berada pada peringkat 3 (Sedang).
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	2221	3	Kuantitas dan kualitas SDM BPR memadai.
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	2222	2	Terjadi human error pada BPR, namun tidak berdampak finansial bagi BPR.
Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2230	2	TI BPR sesuai dengan ketentuan dan BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.
Pilar penyimpangan (Fraud)	2240	3	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR.
Faktor eksternal	2250	2	Terdapat faktor eksternal namun tidak berdampak finansial bagi BPR.
Lainnya	2299		

Form 0201

Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Tingkat Risiko Inheren Operasional	2292	2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakter antara lain: a. bisnis BPR memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; dan e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah.

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2310	2	Penilaian pada indikator Pengawasan Direksi dan Komisaris berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2311	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional serta Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2312	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi serta evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2313	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Operasional serta menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2314	2	Direksi mengomunikasikan kebijakan Risiko operasional dan seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	2315	2	Unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	2316	2	Terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2320	2	Penilaian pada indikator Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2321	2	Terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan.
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	2322	2	memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	2323	2	Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko kepatuhan dan menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.
Kecukupan Proses dan Sistem	2330	2	Penilaian pada indikator Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2331	2	Telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi penerapan manajemen risiko operasional dilakukan dengan memadai dan penerapan manajemen risiko operasional tidak dilakukan cukup konsisten.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2332	2	Telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko operasional data pada sistem informasi manajemen risiko cukup lengkap, akurat, kini dan utuh sistem informasi manajemen risiko mendukung direksi dalam pengambilan keputusan dan sistem informasi manajemen risiko cukup mendukung SKMR dalam pembuatan laporan kepada direksi setiap semester.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	2333	2	Telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh direksi, telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan dan telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	2334	2	Telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2340	2	Penilaian pada indikator Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2341	2	SKAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada direktur utama, Audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi.

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2342	2	Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko operasional dan tidak berdampak signifikan ,terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki ekspour risiko operasional SKMR dan SKAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki ekspour risiko oprasional
Tingkat KPMR	2350	2	KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakter antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. 9. Manajemen keberlangsungan usaha (business continuity management/BCM) andal dan teruji. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.

Form 0300 Analisis Risiko Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3100	2	Peringkat 2, Rendah
Tingkat Risiko Inheren	3200	2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain: a. terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPR; b. rekam jejak kepatuhan BPR baik; c. BPR telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku; d. terdapat proses litigasi pada BPR tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR; e. perjanjian yang dibuat oleh BPR memadai; f. terdapat produk dan aktivitas BPR yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan.

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat KPMR	3300	2	KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.

Form 0301

Kertas Kerja Risiko Inheren Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	3210	2	Penilaian pada pilar Risiko Inheren [Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain] berada pada peringkat 2 (Rendah).
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	3211	2	Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dan dalam proses penyesuaian.
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	3212	2	Tidak terdapat pelanggaran berulang
Faktor kelemahan aspek hukum	3220	2	Penilaian pada pilar Risiko Inheren [Faktor kelemahan aspek hukum] berada pada peringkat 2 (Rendah).
Kelemahan dalam perikatan	3221	2	Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak terdapat kelemahan dalam perjanjian kredit
litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	3222	2	Tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	3223	1	Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian
Lainnya	3299		
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	3292	2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain: a. terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPR; b. rekam jejak kepatuhan BPR baik; c. BPR telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku; d. terdapat proses litigasi pada BPR tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR; e. perjanjian yang dibuat oleh BPR memadai; f. terdapat produk dan aktivitas BPR yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan.

Form 0302

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3310	2	Penilaian pada indikator Pengawasan Direksi dan Komisaris berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3311	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dan telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3312	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi dan evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3313	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan. Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris dan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko kepatuhan.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3314	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, Direksi mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dan seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	3315	2	memiliki SKMR yang merangkap fungsi kepatuhan dan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	3316	2	terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	3317	2	Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR dan memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR.

Form 0302

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3320	2	Penilaian pada indikator Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3321	2	telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dan terdapat kesesuaian. antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan. Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap. pelanggaran ketentuan dan terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	3322	2	memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten dan melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	3323	2	memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan dan menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.
Kecukupan Proses dan Sistem	3330	2	Penilaian pada indikator Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3331	2	telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan. aktivitas usaha BPR, ketidak patuhan BPR, serta proses litigasi serta penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai dan cukup konsisten.

Form 0302

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3332	2	2 telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3340	2	2 Penilaian pada indikator Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	3341	2	2 SKAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama ,audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3342	2	2 Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan dan SKMR dan SKAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.

Form 0302

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Tingkat KPMR	3350	2	KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.

Form 0400

Analisis Risiko Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	4100	2	Peringkat 2, Rendah
Tingkat Risiko Inheren	4200	3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko sedang, dengan karakteristik antara lain: a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil cukup signifikan; c. cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan cukup baik; dan e. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi yang cukup baik, serta standby loan dan dukungan likuiditas dari grup BPR cukup memadai.

Form 0400

Analisis Risiko Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat KPMR	4300	1	KPMR untuk Risiko likuiditas sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. BPR termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. 5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik. 7. Strategi Risiko likuiditas sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 10. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 11. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban	4210			3 Penilaian pada pilar Risiko Inheren [Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban] berada pada peringkat 3 (Sedang).
Rasio aset likuid terhadap total aset	4211	6,10		2 masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	4212	17,90		2 komposisi aset likuid lebih rendah dari 20 persen terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	4213	275,22		3 BPR mencatat LDR sebesar 275,21 persen dengan peringkat risiko 3 (Sedang). LDR tinggi ini menandakan risiko yang lebih besar karena kredit yang diberikan melebihi dana pihak ketiga. Meskipun demikian, kualitas kredit tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, sehingga risiko masih dalam kategori moderat.
Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	4214	31,93		2 BPR menilai risiko berdasarkan rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga sebesar 31,93 persen, yang diklasifikasikan dalam peringkat 2 (Rendah). Peringkat ini menunjukkan bahwa lebih dari 25 persen dana berasal dari 25 nasabah terbesar, dan seluruhnya merupakan nasabah lama, yang menandakan konsentrasi dana yang relatif tinggi dari sumber yang sama.
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	4215	71,81		4 Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan BPR adalah sebesar 67,58 persen, yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (peringkat 4). Ini berarti pendanaan non inti BPR sangat signifikan, bahkan mendominasi total pendanaan, karena melebihi ambang batas 10 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPR memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber pendanaan non inti.
Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan	4220			3 Penilaian pada pilar Risiko Inheren [Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan] berada pada peringkat 3 (Sedang).
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan	4221			3 Berikut adalah ringkasan informasi parameter risiko BPR dalam 2-3 kalimat... BPR dinilai memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya, baik dalam situasi normal maupun krisis. Dengan peringkat 3 (Sedang), BPR mampu memenuhi semua kewajiban dan kebutuhan arus kasnya (100 persen), serta arus kas dari aset dan kewajiban yang saling menutup dengan baik, terutama dalam jangka pendek (100 persen).
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.	4222			3 BPR memiliki komitmen pendanaan yang cukup memadai, dengan peringkat 3 (Sedang). Hal ini ditunjukkan dengan reputasi BPR yang baik, akses pinjaman bank yang memadai, dan adanya komitmen atau dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali, perusahaan induk, atau intra grup yang memadai.

Form 0401

Kertas Kerja Risiko Inheren Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Lainnya	4299			
Tingkat Risiko Inheren Likuiditas	4292		3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko sedang, dengan karakteristik antara lain: a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil cukup signifikan; c. cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan cukup baik; dan e. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi yang cukup baik, serta standby loan dan dukungan likuiditas dari grup BPR cukup memadai.

Form 0402

Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	4310	1	Penilaian pada indikator Pengawasan Direksi dan Komisaris berada pada peringkat 1 (Sangat Rendah).
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	4311	1	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dan telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	4312	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi dan evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	4313	1	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris dan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko likuiditas.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	4314	1	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas;. - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	4315	1	memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas dan unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	4316	1	terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	4320	1	Penilaian pada indikator Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit berada pada peringkat 1 (Sangat Rendah).

Form 0402

Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	4321	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan Risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	4322	1	memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten dan melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	4323	1	terdapat kesesuaian antara kebijakan prosedur produk dan aktivitas baru dengan ketentuan
Kecukupan Proses dan Sistem	4330	2	Penilaian pada indikator Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	4331	2	telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	4332	2	BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	4340	2	Penilaian pada indikator Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh berada pada peringkat 2 (Rendah).
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	4341	2	SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan

Form 0402

Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	4342	2	seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan tidak berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas dan SKMR dan SKAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.
Tingkat KPMR	4350	1	KPMR untuk Risiko likuiditas sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. BPR termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai, dengan karakteristik antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan sangat memadai. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. 5. Secara umum SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik. 7. Strategi Risiko likuiditas sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 10. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 11. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Form 0500

Analisis Risiko Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko			
Tingkat Risiko Inheren			
Tingkat KPMR			

Form 0501

Kertas Kerja Risiko Inheren Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR			
Kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR			
Signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi			
Frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah			
Administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah			
Signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah			
Pelanggaran etika bisnis			
Transparansi informasi keuangan			
Transparansi produk dan layanan BPR			
Lainnya			
Tingkat Risiko Inheren Reputasi			

Form 0502

Kertas Kerja KPMR Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?			
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?			
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?			
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi manajemen risiko reputasi?			
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko reputasi?			
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?			
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara berkala?			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan ketentuan?			
Kecukupan Proses dan Sistem			
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR?			

Form 0502

Kertas Kerja KPMR Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?			
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh			
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?			
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?			
Tingkat KPMR			

Form 0600 Analisis Risiko Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko			
Tingkat Risiko Inheren			
Tingkat KPMR			

Form 0601

Kertas Kerja Risiko Inheren Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Penetapan strategi bisnis			
Penyusunan rencana bisnis			
Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis			
Keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor			
Pencapaian target bisnis			
Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPR			
Rekam jejak (track record) keberhasilan BPR dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis			
Lainnya			
Tingkat Risiko Inheren Strategik			

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?			
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?			
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategik, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?			
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko strategik, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko strategik terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?			
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategik dan fungsi manajemen risiko strategik?			
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko strategik?			
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?			
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara berkala?			
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko strategik sesuai dengan ketentuan?			
Kecukupan Proses dan Sistem			
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategik yang melekat pada kegiatan usaha BPR?			
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?			

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh			
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?			
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategik telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?			
Tingkat KPMR			

Form 0700
Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Faktor/Komponen Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		2	25,00	0,50		2	25,00	0,50
Tata Kelola		2	30,00	0,60		2	30,00	0,60
Rentabilitas		4	15,00	0,60		3	15,00	0,45
ROA	1,08	3			1,58	2		
BOPO	100,90	5			91,06	3		
NIM	5,11	4			7,58	3		
Permodalan		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
KPMM	24,82	1			27,18	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	147,52	4			149,22	4		
Nilai Komposit				2,60				2,45
Peringkat Komposit				2				2

Nama BPR : PT BPR Berkah (Perseroda)

Periode : 30 Juni 2025

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Kondisi BPR secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi PT. BPR Berkah secara umum cukup sehat. Penilaian ini didasarkan pada beberapa faktor kunci seperti profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. . Profil Risiko: Dikatakan bahwa profil risiko PT. BPR Berkah dinilai rendah. Ini menunjukkan bahwa manajemen PT. BPR Berkah memiliki kebijakan yang efektif dalam mengelola risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga tersebut. Hal ini bisa mencakup manajemen risiko kredit, likuiditas, dan risiko lainnya... Penerapan Tata Kelola: Penerapan tata kelola di PT. BPR Berkah dinilai sangat baik. Tata kelola yang baik menunjukkan bahwa lembaga memiliki struktur organisasi yang efisien, proses pengambilan keputusan yang jelas, dan sistem pengawasan yang kuat. Ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional BPR... Rentabilitas: Rentabilitas PT. BPR Berkah secara umum dianggap sehat. Rentabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba yang memadai dari kegiatan operasionalnya. Ini dapat menjadi indikator keberlanjutan dan daya saing BPR di pasar... Permodalan: Tingkat permodalan PT. BPR Berkah dinilai cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa BPR memiliki cukup modal untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin timbul, serta memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas... Kelemahan Tidak Signifikan: Meskipun diakui bahwa mungkin ada kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal, namun dianggap bahwa kelemahan tersebut tidak signifikan secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa PT. BPR Berkah mampu mengelola dan memitigasi kelemahan-kelemahan yang ada tanpa mempengaruhi secara substansial kesehatan keseluruhan lembaga.. Dengan demikian, PT. BPR Berkah tampaknya mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Keberhasilan BPR dalam beberapa aspek kunci ini memperkuat keyakinan bahwa lembaga tersebut berada dalam kondisi finansial dan operasional yang kuat. Tetapi, perlu diingat bahwa analisis lebih lanjut dan pemantauan terus-menerus tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan BPR mengingat dinamika pasar yang selalu berubah.

Analisis Profil Risiko

Profil Risiko BPR termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: 1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.. 2. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Analisis Tata Kelola

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Analisis Rentabilitas

Dengan demikian, PT. BPR Berkah secara keseluruhan tampaknya berada dalam kondisi yang sehat dan memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Kombinasi rentabilitas yang baik, dukungan permodalan, dan fokus pada core earnings menandakan manajemen yang efektif dan strategi bisnis yang berhasil.

Analisis Permodalan

Secara keseluruhan, PT.BPR BERKAH dengan peringkat 3 ini dapat dianggap sebagai institusi keuangan yang cukup baik, dengan fondasi permodalan yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan dukungan yang memadai untuk pertumbuhan bisnis ke depan. Keseluruhan kondisi ini menciptakan kepercayaan baik dari regulator, pemegang saham, dan pelanggan.

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Berkah (Perseroda)

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

981291-1-PRBPRKS-R-S-20250630-010201-600613-28072025163554

Periode Data

S1 2025

User ID Petugas Pelaporan

bankberkah@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-07-28 16:35:54



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.